

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**MIFTAHUL FITRI
NIM. 190802077**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Fitri
NIM : 190802077
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sawang Bunga, 28 April 2001
Alamat : Desa Ujung Tanah, Kecamatan Samadua,
Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2023
Yang Menyatakan,



MIFTAHUL FITRI
NIM. 190802077

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

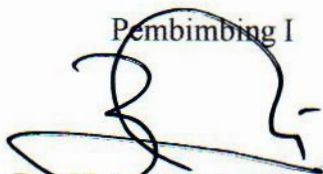
MIFTAHUL FITRI

NIM. 190802077

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

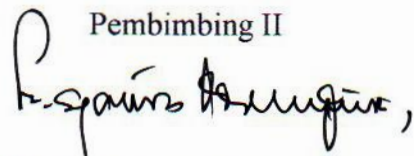
Pembimbing I



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

NIP. 196610231994021001

Pembimbing II



Hijrah Saputra, S.Fil.L., M.Sos

NIP. 199007212020121016

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

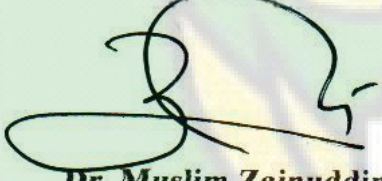
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Juli 2023
22 Dzulhijjah 1444

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

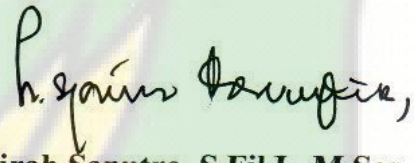
Ketua,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

NIP. 196610231994021001

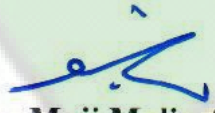
Sekretaris,



Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos

NIP. 199007212020121016

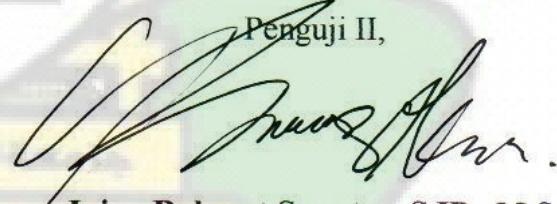
Penguji I,



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag

NIP. 197403271999031005

Penguji II,



Iping Rahmat Saputra, S.IP., M.Sc

NIDN. 1302059101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang sering dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Demikian juga dengan Aceh Selatan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 32,25 ribu jiwa berdasarkan hasil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021. Aceh Selatan merupakan wilayah yang potensial akan sumber daya seperti pertanian dan kelautan, akan tetapi tingkat kemakmuran di daerah ini masih di bawah rata-rata jika diukur berdasarkan angka kemiskinan pertahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas sosial dalam pengentasan kemiskinan serta apa yang menjadi hambatan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan memiliki peran yang sangat besar dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan berperan dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kurang mampu serta penyaluran bantuan melalui program PKH, BPNT dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam merealisasikan program-program tersebut dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya adalah data penduduk miskin yang tidak akurat sehingga menyulitkan dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam proses pengentasan kemiskinan, kemudian juga dari faktor anggaran. Angka kemiskinan memanglah harus terus di tekan terutama oleh instansi terkait seperti dinas sosial agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan makmur.

Kata Kunci : *Peran, Dinas Sosial, Kemiskinan, Kabupaten Aceh Selatan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji beserta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan”**. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis sanjung sajikan kepangkuan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya, karena berkat beliau kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Siti Nurzalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Banda Aceh
5. Ucapan terimakasih kepada bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan banyak ilmu, arahan dan masukan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Ucapan terimakasih kepada bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I.,M.Sos. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan banyak ilmu, arahan, masukan dan semangat yang sangat luar biasa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara
8. Teristimewa ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada cinta dan panutan, Ayahanda Drs. Nuril Hadi dan Ibunda Zuraini yang telah mendidik, memotivasi, memberikan dukungan moril maupun materil serta memberikan lantunan doa yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi
9. Kepada saudara-saudari, Nuzman Alfian Ridha, S.Si, Hikmatul Nurza, S.E, Arfatul Hajja, Saiful Muarif, dan Husnul Fata. Terimakasih atas segala kasih sayang, semangat serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi

10. Terimakasih kepada Fachrul Rizqa, S.IP, selaku partner yang memberikan semangat dan tawa serta tempat berkeluh kesah dalam menyelesaikan tugas akhir ini
11. Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah
12. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diri penulis. Hebat bisa berdiri tegap menghadapi segala lika-liku hidup walau kadang jenuh dan ingin berhenti.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis di masa akan datang. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Penulis,

Miftahul Fitri

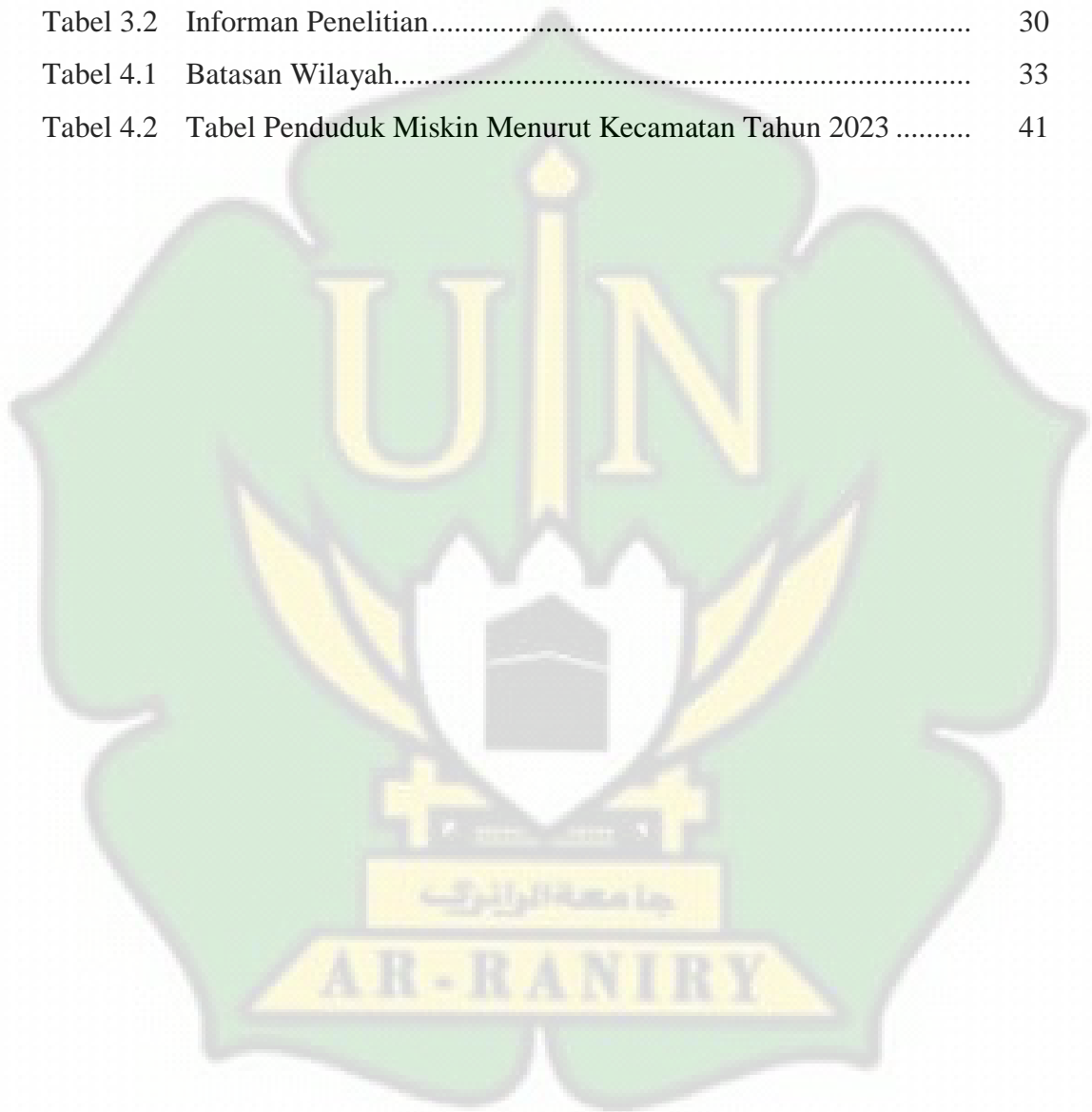
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Peran	12
2.2.1. Pengertian Peran.....	12
2.2.2. Aspek-Aspek Peran	15
2.3. Teori Struktur Fungsional	16
2.4. Kemiskinan	18
2.3.1. Pengertian Kemiskinan	18
2.3.2. Penyebab Kemiskinan.....	15
2.3.3. Dampak Kemiskinan.....	21
2.3.4. Kriteria Masyarakat Miskin	12
2.4. Pengentasan Kemiskinan.....	23
2.5. Kesejahteraan Sosial	27
2.6. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Pendekatan Penelitian.....	29
3.2. Fokus Penelitian	30

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	30
3.5. Informan Penelitian	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Hasil Penelitian.....	35
4.1.1. Kabupaten Aceh Selatan	35
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan	38
4.1.3. Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.....	43
4.2. Pembahasan	44
4.2.1. Peran Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan	45
4.2.3. Hambatan Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan	59
BAB V PENUTUP	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

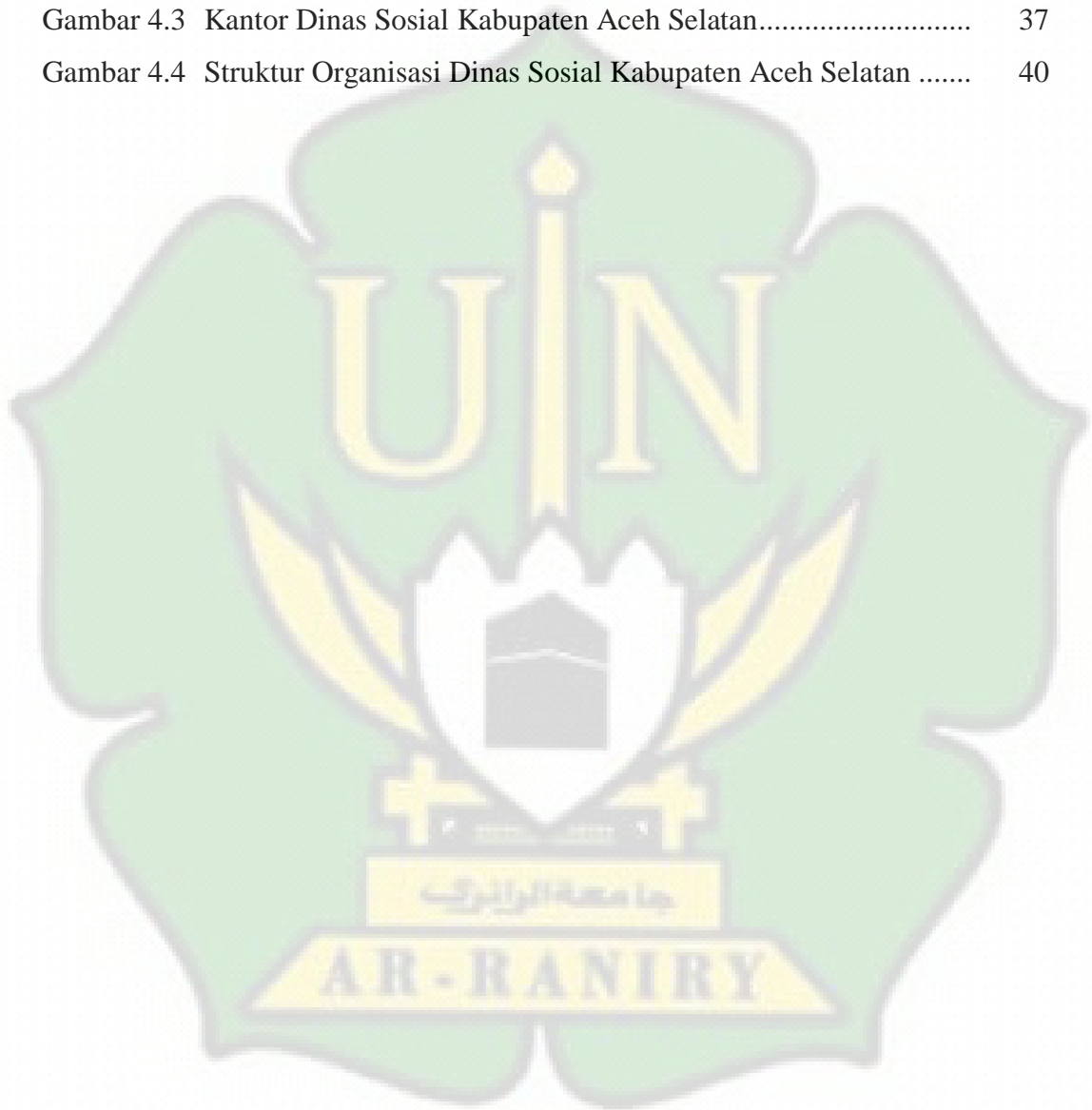
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Salatan.....	4
Tabel 3.1	Fokus Penelitian.....	28
Tabel 3.2	Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.1	Batasan Wilayah.....	33
Tabel 4.2	Tabel Penduduk Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2023	41



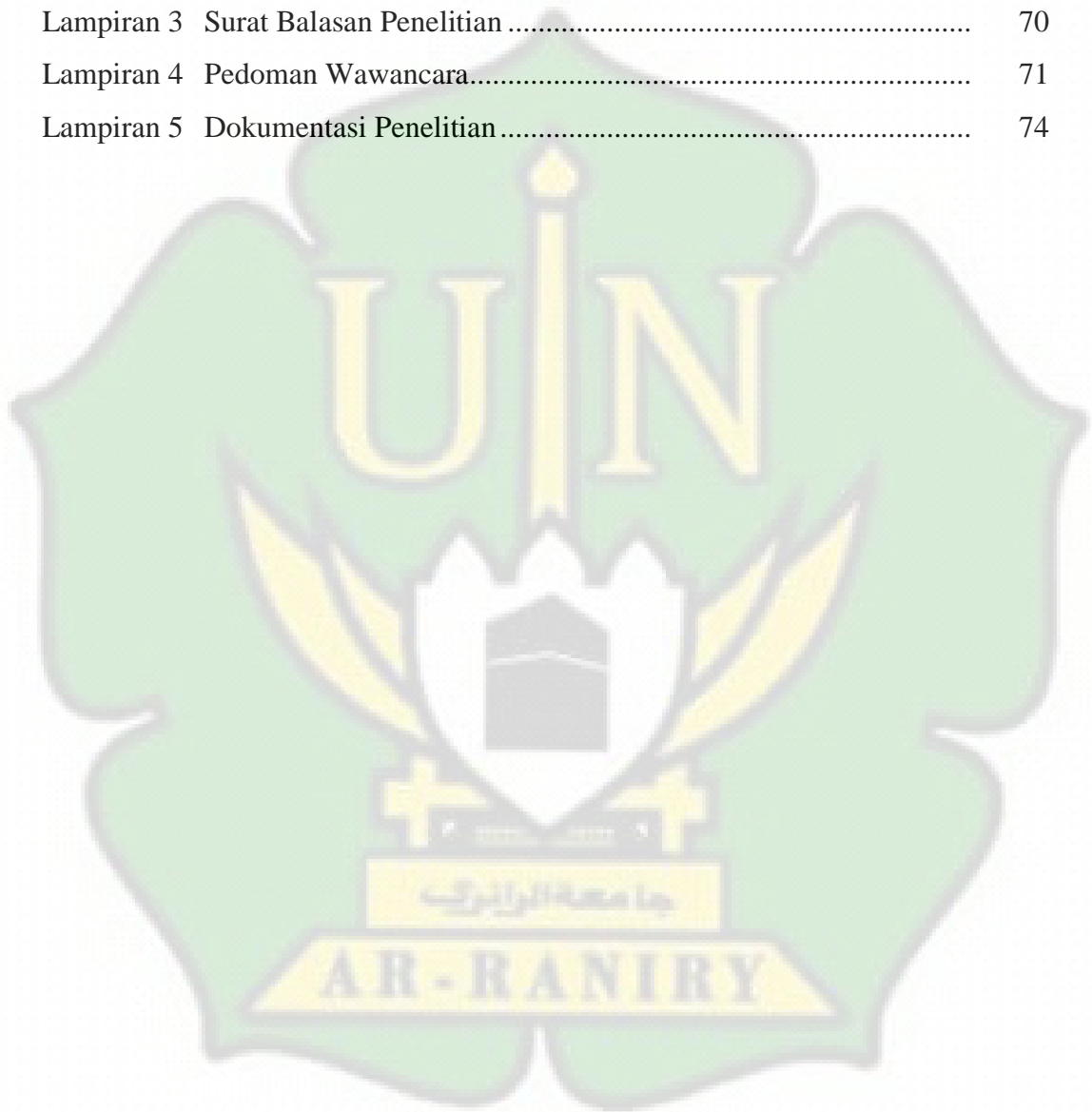
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Aceh Selatan.....	34
Gambar 4.2 Logo Pemerintahan Aceh Selatan.....	35
Gambar 4.3 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.....	37
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP	68
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	69
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	70
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	71
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mayoritas negara berkembang di dunia berjuang melawan kemiskinan. Selama ini, masalah kemiskinan sangat sulit diatasi, atau paling tidak dikurangi. Indonesia sebagai negara berkembang masih terus berupaya mengentaskan kemiskinan bagi rakyatnya.¹ Padahal secara umum Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain pertambangan, laut, minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Terbukti dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, sumber daya alam yang ada di tanah NKRI saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal, ini dapat di lihat dari angka kemiskinan yang masih terbilang tinggi. Dilihat dari September 2022 sebanyak 6,36 juta penduduk Indonesia, atau 9,57% dari populasi, hidup dalam kemiskinan.²

¹ Murdiyana dan Mulyana, *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Jurnal Politik Pemerintahan, 2017, hal. 73-96.

² <https://www.bps.go.id> di akses pada tanggal 6 April 2023

Inpres yang fokus pada implementasi pengentasan kemiskinan disahkan pada tahun 2022 dan merupakan salah satu inisiatif konkrit yang dilakukan pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan. Menurut Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, mengarahkan yang mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk memastikan penetapan sasaran dan program integrasi antar kementerian/lembaga dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang dipusatkan pada lokasi-lokasi prioritas.³

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki salah satu tingkat kemiskinan tertinggi. Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan Aceh mencapai Rp 13,95 triliun pada 2021.⁴ Realisasi pendapatan di Aceh menempati urutan keenam se-Indonesia. Kesejahteraan warga Aceh idealnya harus lebih baik dari provinsi lain dengan anggaran lebih kecil jika Aceh memiliki anggaran besar. Namun, faktanya tidak selalu seperti yang terlihat di atas kertas. Tergantung bagaimana pengelolannya dan kondisi lainnya, anggaran yang besar tidak dapat menjamin akan memberikan output berupa kesejahteraan masyarakat.

Menurut Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, kemiskinan ditandai dengan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ketika sebuah

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

⁴ <https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> di akses pada tanggal 6 April 2023

komunitas tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dikatakan dalam kemiskinan, banyak orang yang kekurangan sarana pendukung, dinding rumah kayu yang rusak, dan sebagainya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Tertinggal yang salah satunya berbasis rumah tangga sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.⁵

Masyarakat miskin adalah warga negara yang sah, negara harus memberi mereka perlindungan. Akibatnya, setiap daerah membutuhkan departemen yang membidangi masalah kesejahteraan sosial. Menurut Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Agar warga negara dapat hidup layak dan mampu berkembang menjadi makhluk sosial yang cakap, kesejahteraan sosial mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya.⁶

Ada 18 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan secara administratif otonom, terletak di bagian selatan Provinsi Aceh. Dilihat dari letaknya, Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil di sebelah selatan, Samudera Hindia di sebelah barat, dan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah timur. Hal ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya di utara. Dengan adanya wilayah kabupaten lain yang berbatasan secara administratif, wilayah ini memiliki banyak potensi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi, termasuk

⁵ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

⁶ Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial

pertanian, perikanan, dan kelautan, serta kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya.

Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021, terdapat 32,25 ribu penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan.⁷ Padahal Aceh Selatan merupakan wilayah yang potensial akan sumber daya seperti pertanian dan kelautan perikanan, akan tetapi tingkat kemakmuran jika diukur dari perekonomian masyarakat dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan masih di bawah rata-rata jika dilihat dari angka kemiskinan pertahunnya yang bergerak secara dinamis.

Dari hasil observasi awal, peneliti melihat terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Faktor tersebut berasal dari pemerintahan itu sendiri serta masyarakat, sehingga sampai saat ini permasalahan kemiskinan belum dapat diselesaikan. Adapun faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Aceh Selatan diantaranya, kualitas pendidikan serta kesehatan yang masih rendah di beberapa desa. Budaya hidup masyarakat yang malas, serta kebijakan pemerintahan yang belum efektif hingga penyaluran bantuan yang masih belum tepat sasaran. Seharusnya permasalahan kemiskinan telah mampu diatasi di Kabupaten Aceh Selatan, terlebih Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua yang berada di Provinsi Aceh.

⁷ <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/jumlah-penduduk-miskin.html> diakses pada tanggal 3 April 2023

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Selatan

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019-2021 (Persen)		
2019	2020	2021
13,09%	12,87%	13,18%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2019 dan 2021, tampak jelas angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan di tahun 2019 mencapai 13,09 %, turun sedikit di tahun 2020 yaitu 13,18%, namun kembali naik di tahun 2021 pada 13,18%.⁸ Padahal Dinas Sosial Aceh Selatan telah berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memerangi kemiskinan melalui beberapa program yang telah dilaksanakan sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Perempuan Rentan Sosial antara lain bantuan untuk usaha menjahit, usaha produksi kue, pemberian Bantuan Pangan Non Tunai dan sebagainya, namun hasilnya belum maksimal jika dilihat dari angka kemiskinan pertahunnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diurai oleh penulis diatas, maka dalam penelitian ini penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Selatan”**.

⁸ <https://aceh.bps.go.id> diakses pada tanggal 3 April 2023

1.2. Identifikasi Masalah

Aceh Selatan merupakan wilayah yang potensial akan sumber daya seperti pertanian dan kelauatan perikanan, akan tetapi tingkat kemakmuran jika diukur dari perekonomian masyarakat dalam lingkup Kabupaten Aceh Selatan masih dibawah rata-rata jika dilihat dari angka kemiskinan pertahunnya yang bergerak secara dinamis.

Masalah utama yang dihadapi Pemerintah di setiap periode adalah masalah kemiskinan. Peran Pemerintah daerah dalam hal ini sangatlah krusial dalam menentukan langkah-langkah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini berfokus kepada Peran Dinas Sosial selaku sub bagian dari pemerintah kabupaten yang menangani akan dampak-dampak sosial yang terjadi di masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di

Kabupaten Aceh Selatan.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dilalui Dinas Sosial dalam pengentasan di Kabupaten Aceh Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada dua jenis manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan menjadi sumber informasi, khususnya bagi disiplin ilmu ketatanegaraan, serta bagi peneliti lain, khususnya yang berkepentingan dengan peran dinas sosial dalam pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya bagi Dinas Sosial dalam mengentas kemiskinan.

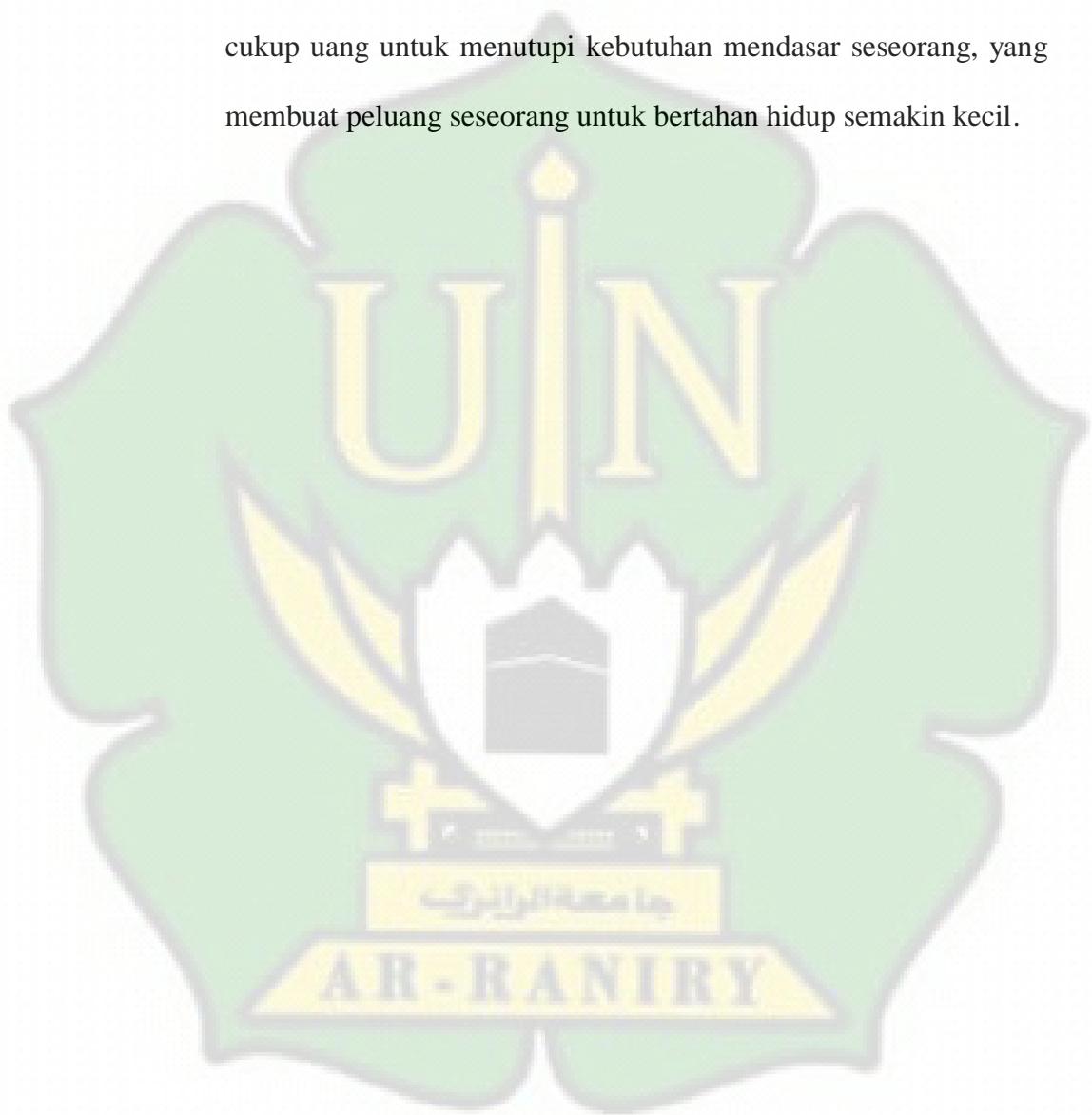
1.6 Penjelasan istilah

Ada beberapa penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Peran : Tindakan atau perilaku seseorang yang mendiami atau memegang posisi dalam menjalankan hak dan kewajiban spesifik posisinya. Jika seseorang memainkan peran ini dengan baik, masuk akal jika mereka ingin bertindak sesuai dengan lingkungannya.

Pengentasan : Pengentasan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengentas atau mengentaskan.⁹

Kemiskinan : Definisi kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan cukup uang untuk menutupi kebutuhan mendasar seseorang, yang membuat peluang seseorang untuk bertahan hidup semakin kecil.



⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama, berjudul “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya” ditulis oleh Nano Prawoto. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan telah menjadi isu yang berkelanjutan hingga saat ini. Meskipun Pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, hasilnya hanya sedikit yang berubah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi landasan strategi pembangunan Indonesia hingga saat ini. Nampaknya ekspansi ekonomi yang signifikan tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan di antara semua kategori masyarakat. Ada *trade-off* antara ekspansi dan pemerataan.¹⁰

Relevansi dari penelitian Nano Prawoto dan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kemiskinan. Dalam hal ini, kedua peneliti melakukan kajian penelitian lapangan tentang permasalahan kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat. Perbedaan dari kedua penelitian adalah, Nano Prawoto memiliki fokus untuk memahami kemiskinan serta strategi penanggulangannya. Sedangkan peneliti berfokus kepada peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.

Penelitian kedua, berjudul “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

¹⁰ Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2009

di Indonesia” ditulis oleh Murdiyana dan Mulyana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan upaya Pemerintah membuat sejumlah kebijakan, kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang melahirkan program-program penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin terus cenderung meningkat, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2016. Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Indonesia dapat melakukan analisis kebijakan pada tahap evaluasi atau penilaian kebijakan dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Indonesia.¹¹

Relevansi dari penelitian Murdiyana dan Mulyana dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang upaya pengentasan kemiskinan, bahkan kedua penelitian ini sama-sama memiliki fokus untuk meneliti peran serta kebijakan dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah Murdiyana dan Mulyana berfokus hanya pada kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, sedangkan peneliti berfokus kepada peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.

Penelitian ketiga, dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, Studi Kasus Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015 oleh Hikmah Mulyadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap masalah kemiskinan di Provinsi Aceh menjadi pendorong penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, variabel IPM dan ZIS berpengaruh besar terhadap angka kemiskinan di kabupaten

¹¹ Mardiyana dan Mulyana, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Politik Pemerintahan, 2007

dan kota di Provinsi Aceh sedangkan variabel bertumbuhnya masyarakat dan TPT tidak berpengaruh.¹²

Relevansi dari penelitian Hikmah Mulyadi dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang kemiskinan. Dalam hal ini, kedua peneliti melakukan kajian penelitian lapangan tentang permasalahan kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat Aceh. Adapun perbedaan dari penelitian adalah, Hikmah Mulyadi berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sedangkan peneliti berfokus kepada peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.

Penelitian keempat, dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Tahun 2017-2020)” oleh Mujiburrahman. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui (1) Pendekatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan. (2) Dampak kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan di bidang sosial, kesehatan, juga pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rencana Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi kemiskinan dapat dirasakan melalui beberapa sudut, salah satunya adalah dari sudut pendidikan.¹³

Relevansi dari penelitian Mujiburrahman dengan peneliti adalah memiliki kajian penelitian yang sama-sama, kedua peneliti sama-sama mengkaji tentang peran pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Sedangkan perbedaan dari kedua

¹² Hikmah Mulyadi “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015)”. (Skripsi) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2018

¹³ Mujiburrahman “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017-2020” (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda aceh 2021

penelitian ini adalah, Mujiburrahman berfokus kepada strategi pemerintah kota Banda Aceh dalam penanggulangan kemiskinan t2017-2020. Sedangkan peneliti berfokus kepada peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.

Penelitian kelima, dengan judul “Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Aceh” oleh Heru Syah Putra. Penyebaran dan penggunaan uang masyarakat inilah yang menginspirasi penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak hibah desa terhadap kemiskinan di Aceh. Temuan penelitian menyatakan bahwa meningkatnya dana desa secara relevan dapat menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Angka kemiskinan Aceh dapat diturunkan sebesar 0,316 persen dengan peningkatan 1% keuangan desa. Tingkat signifikansi 95 persen tercapai untuk hasil estimasi.¹⁴

Relevansi dari kedua penelitian ini adalah mengkaji tentang permasalahan kemiskinan, serta metode pendekatan penelitian yang digunakan sama. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah, Heru Syah Putra berfokus kepada pengaruh dana desa terhadap kemiskinan Di Aceh. Sedangkan peneliti berfokus kepada peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.

2.2 Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Peran ialah rangkaian tindakan yang terkait dengan posisi tertentu. Berbedanya peran menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Namun, faktor-

¹⁴ Heru Syah Putra, *Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di aceh*, Jurnal Analis kebijakan 2018

faktor yang menentukan apakah suatu perilaku cocok dalam satu keadaan dan tidak tepat dalam keadaan lain sebagian besar tidak bergantung pada orang yang melakukan posisi tersebut.¹⁵

Merton mendefinisikan peran sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang memegang posisi tertentu. Terkait situasi ini, peran juga terkait dengan jenis koneksi yang berkembang antara dua orang yang mempunyai status sosial berbeda.¹⁶ Kemudian, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa komponen dinamis peran adalah status atau kedudukannya. Kinerja seseorang terhadap suatu peran dapat diamati dari tindakannya dalam memenuhi tugas dan komitmennya.¹⁷

John M. Ivancevich, Robert, dan Michael T. Matteson juga menyatakan peran yang dilakukan adalah perilaku yang sungguh-sungguh dikerjakan oleh orang tersebut. Setiap posisi mempunyai peran yang menunjukkan perilaku yang diharapkan dari pemegang jabatan.¹⁸ Aspek dinamis peran diekspresikan dalam tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki atau memegang suatu jabatan dalam menyamakan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya. Wajar apabila seseorang memainkan peran dengan bagus, dia

¹⁵ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007) hal. 25

¹⁶ Raho, Bernand. *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007) hal. 67

¹⁷ Edi Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 3

¹⁸ John M. Ivancevich, Robert dan Michael T. Matteson, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006)

akan berkehendak bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan kemauan lingkungannya.

Menurut Komarudin, pengertian peran adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu tanggung jawab utama manajemen
- b. Perilaku yang diharapkan sejalan dengan status
- c. Komponen pekerjaan seseorang dalam tim atau lembaga
- d. Peran yang diantisipasi seseorang atau kualitasnya sendiri
- e. Bagaimana setiap variabel berkontribusi pada hubungan sebab akibat.

Beberapa dimensi peran antara lain sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa melaksanakan peran merupakan kebijakan yang tepat dan bijaksana.
2. Peran sebagai taktik. Hal ini menunjukkan bahwa peran merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat.
3. Gunakan sebagai alat komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut dimanfaatkan sebagai perangkat atau alat dalam menerima masukan bagi proses pengambilan keputusan berupa data. Pencitraan ini berlandaskan pikiran bahwa pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, menjadikan opini masyarakat sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan yang tanggap serta akuntabel.
4. Berfungsi sebagai alat menyelesaikan sengketa. Ini berarti bahwa melalui tindakan, peran digunakan untuk mengurangi atau meredam konflik untuk mencapai kesepakatan di antara sudut pandang yang sudah ada. Gagasan

ini didasarkan pada gagasan bahwa membicarakan sudut pandang yang berbeda dapat menumbuhkan toleransi dan pengertian sambil menurunkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian.¹⁹

2.2.2 Aspek-Aspek Peran

Terminologi teori peran dibagi oleh Biddle dan Thomas menjadi empat kategori.²⁰

- a. Peserta interaksi sosial
- b. Perilaku terkait hubungan
- c. Kedudukan individu dalam kaitannya dengan perilaku
- d. Ikatan dengan individu dan perilaku

Peran dalam tatanan hukum menyangkut tanggung jawab, wewenang, dan siasat yang dipakai oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Peran dalam skenario ini dipecah menjadi:

- a. Fungsi normatif ialah salah satu yang dimainkan oleh individu atau lembaga dan dilandaskan pada segolongan norma sosial.
- b. Peran yang ideal adalah peran yang dimainkan seseorang atau organisasi sesuai dengan nilai-nilai ideal atau apa yang pantas diberikan tempatnya dalam suatu sistem.

¹⁹ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Sentosa, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan, (Jakarta : Walhi,2003), hal. 67

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 215

- c. Pekerjaan faktual adalah seseorang atau organisasi yang didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi dalam ilmu pengetahuan atau sosial atau pada peristiwa sosial yang sebenarnya.

2.3 Teori Struktural Fungsional

Struktural fungsional adalah teori yang berkembang dari para pemikir klasik, yaitu *Emile Durkheim, Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons*. *Functionalist* yakni semua penganut pendekatan fungsional. Mereka melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu bentuk yang semua bagiannya saling ketergantungan satu sama lain dan bekerja sama mewujudkan keselarasan. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak membuat mereka menolaknya, tetapi mereka justru sangat yakin bahwasanya masyarakat dengan sendirinya akan mengembangkan proses yang bisa mengontrol konflik yang terjadi.²¹

Durkheim berpendapat bahwasanya ikatan solidaritas mekanik yang dapat ditemui dalam masyarakat yang masih sederhana ibarat kohesi antara benda-benda mati. Sedangkan ikatan solidaritas organik yang ditemui dalam masyarakat kompleks ibarat kohesi antara organ hidup. Pandangan tersebut menggambarkan penganutan analogi organik pandangan terkait timbulnya kesamaan antara organisme biologis dengan masyarakat. Analogi organik adalah upaya

²¹ I.B. Wirawan, *Teori–Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2015, hal. 4

memperhatikan masyarakat yang sering ditemui pada kalangan yang menganut teori fungsionalisme.²²

Berikut ini bentuk yang dipertunjukkan Dahrendorf terkait pokok teori fungsionalisme yaitu:

1. Tiap-tiap masyarakat adalah sebuah struktur unsur yang relatif gigih dan seimbang.
2. Memiliki struktur unsur yang melekat dengan baik.
3. Tiap-tiap unsur dalam masyarakat memiliki kegunaan yang dapat memberi kontribusi pada terjaganya masyarakat sebagai suatu sistem.
4. Tiap-tiap struktur sosial yang berdaya guna dilandaskan pada konsesus terkait nilai dilingkaran para anggotanya.

Mengacu pada pemikiran *Max Weber, Willian I. Thomas dan Emile Durkheim, Merton* berusaha memfokuskan perhatian pada struktur sosial. Merton menyoroti asumsi atau postulat itu sebagai kesatuan fungsional masyarakat ialah posisi dimana semua bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu ambang kesesuaian atau keserasian internal yang cukup tanpa adanya konflik berkelanjutan yang tidak dapat diberantaskan atau diurus. Kedua, postulat fungsionalisme universal, beranggapan bahwasanya semua bentuk sosial dan tradisi yang sudah baku mempunyai kegunaan positif.²³

²² Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Jakarta, 2004, hal. 215

²³ Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Jakarta, 2004, hal. 216

Merton berpendapat bahwa struktur yang ada pada sistem sosial ialah realitas sosial yang dipandang mandiri dan merupakan organisasi dari seluruh penggalan yang sama-sama ketergantungan. Bentuk-bentuk perilaku yang relatif abadi terdapat di dalam suatu sistem. Struktur sosial dibandingkan dengan organisasi birokrasi modern, didalamnya memiliki bentuk kegiatan, keterkaitan formal, hierarki dan tujuan organisasi.²⁴ Paradigma Merton bersifat fungsional, disfungsional, dan fungsional universal. Hal tersebut menyebabkan letak seseorang bergantung dengan sistem atau struktur.

2.4 Kemiskinan

2.4.1 Pengertian Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan pendapatan individu untuk menutupi kebutuhan dasar mereka, yang membuat kecil kemungkinan mereka untuk bertahan hidup.²⁵ Memiliki sumber daya yang tidak mencukupi untuk bertahan hidup, seperti uang dan harta benda, terkadang didefinisikan sebagai kemiskinan. Ravallion (dalam Arsyad) mendefinisikan kemiskinan sebagai "kelaparan, tidak punya tempat tinggal, dan kalau sakit, tidak punya uang untuk berobat." Menurut dua definisi yang diberikan di atas, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai

²⁴ I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta Prenamedia Group, 2015, hal. 49

²⁵ Agus Haryadi, *Kemiskinan, Mentalititas Budaya*, (Yogyakarta, Pustaka Rahima, 2005), hal. 123.

kebutuhan, termasuk kebutuhan untuk makanan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.²⁶

Prof. Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang.²⁷ Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan dicirikan sebagai keadaan di mana seseorang kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kesejahteraan ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual.²⁸ Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka, mereka dikatakan dalam keadaan miskin.

2.4.2 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan “dapat disebabkan oleh hal-hal yang bersifat alamiah atau budaya maupun hal-hal yang bersifat non-alamiah atau struktural,” klaim Arsyad. Paul Spicker mengklaim bahwa ada empat aliran pemikiran yang berbeda tentang penyebab kemiskinan yang pertama *individual explanation* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri diantaranya malas, pilihan yang salah, cacat bawaan, gagal dalam bekerja, dan sebagainya. kedua *familial explanation* yakni kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi ketidakberuntungan secara terus-menerus, ketiga *subcultural explanation* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan

²⁶ Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hal. 14

²⁷ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 344.

²⁸ Irfan Syaki Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 69

yang berakibat pada moral masyarakat, dan yang keempat *structural explanation* yaitu kemiskinan sebagai komoditas dari masyarakat yang melahirkan ketidaksesuaian dengan perbedaan status dan hak. Dasar pemikiran yang dikemukakan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa unsur-unsur alam dan non-alam, termasuk lingkungan seseorang, dapat berkontribusi terhadap kemiskinan.²⁹

Penyebab kemiskinan didasari oleh beberapa keadaan, yaitu:

a. Pendidikan yang tidak memadai

Seseorang dengan pendidikan yang lebih rendah cenderung tidak mempunyai keterampilan hidup secara spesifik. Kemampuan memasuki dunia kerja terhambat oleh pendidikan dan/atau keterampilan yang tidak memadai. Karena dia tidak berdaya dalam hal ini, dia melarat.³⁰

b. Malas Bekerja

Karena mempengaruhi kepribadian seseorang, kemalasan menjadi masalah yang harus ditanggapi dengan serius. Seseorang yang memiliki mentalitas ini tidak tertarik dan tidak mau bekerja. Atau membiarkan takdir mengendalikan hidupnya secara pasif. Sikap malas ini seringkali bergantung pada orang lain, baik itu kerabat atau orang yang dianggap mampu memenuhi kebutuhannya.

c. Ketenagakerjaan

²⁹ Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal. 15

³⁰ Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. .344

Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu yang lazim di masyarakat kita dan lingkungan terdekat. Kemiskinan pertama kali muncul sebagai akibat dari rendahnya pendapatan yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran.

d. Pembatasan Modal

Karena realitas modal yang terbatas, mayoritas orang di negara-negara berkembang hidup dalam kemiskinan.

e. Tanggung Jawab Keluarga

Besar kecilnya rumah tangga merupakan petunjuk apakah suatu rumah tangga tergolong kaya atau tidak. Jumlah uang yang dihabiskan untuk pengeluaran hidup meningkat seiring dengan ukuran keluarga.

2.4.3 Dampak Kemiskinan

Muttaqien menunjukkan bahwa kemiskinan pada dasarnya memiliki dampak yang sama di mana-mana. Kehilangan kesejahteraan (sandang, pangan, dan perumahan), pengucilan dari pekerjaan yang baik secara manusiawi, kehilangan hak atas pendidikan, kehilangan kesehatan, kehilangan hak untuk merasa aman, kehilangan hak psikologis, dan kehilangan kemampuan untuk hidup bebas. semua adalah konsekuensi dari kemiskinan.³¹

³¹

Arif Muttaqin, Paradigma dan Pemberantasan Kemiskinan, Rekonstruksi Arah, Pembangunan Menuju Masyarakat yang Berkeadilan, Terbebaskan dan Demokratis, (Jakarta:Khanata Putsaka LP3ES Indonesia, 2006) hal. 146

2.4.4. Kriteria Masyarakat Miskin

Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang kriteria orang miskin, penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal kemiskinan, seperti tidak memiliki tempat tinggal setiap hari. Seseorang secara otomatis dicap miskin jika dia tidak memiliki tempat tinggal setiap hari. Jika seseorang memiliki tempat tinggal atau sering melakukannya, deteksi tambahan dilakukan dengan menggunakan kriteria seperti:

- a. Kepala rumah tangga atau kepala rumah tangga yang tidak bekerja;
- b. Pernahkah Anda khawatir tidak makan atau pergi sepanjang tahun tanpa makan?
- c. Lebih dari separuh pengeluaran keseluruhan digunakan untuk mengelola permintaan makanan;
- d. Selama setahun terakhir, tidak ada pengeluaran untuk pakaian jadi selama 1 (satu) tahun;
- e. Sebagian besar rumah memiliki plesteran atau lantai tanah;
- f. Sebagian besar rumah menggunakan jerami, bambu, kawat, papan kayu, terpal, karton, atau seng untuk dindingnya;
- g. Tidak memiliki toilet pribadi atau menggunakan toilet umum; dan/atau
- h. Listrik 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau non listrik digunakan sebagai sumber penerangan.³²

³²

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Masyarakat Miskin

2.5 Pengentasan Kemiskinan

Serangkaian tindakan ekonomi dan kemanusiaan yang dikenal sebagai pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Dua taktik kunci yang harus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, menurut Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004, sesuai dengan ciri sistem ekonomi kerakyatan. Pertama, mengedepankan berbagai langkah untuk melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang sementara mengalami kemiskinan sebagai dampak negatif dari krisis ekonomi dan kemiskinan struktural. Kedua, mengambil berbagai langkah untuk menolong mereka yang terkena dampak kemiskinan struktural, seperti memberi alat yang mereka butuhkan untuk berwirausaha tinggi, dan bekerja untuk menghentikan munculnya bentuk-bentuk kemiskinan baru. Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dalam konteks ini terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi individu, termasuk pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang bergerak dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti pedagang, petani, dan nelayan kecil.³³

Program pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga berpenghasilan rendah berupaya membantu penyediaan perumahan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah dan organisasi masyarakat secara adil dan terjangkau. Program ini bertujuan untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan pangan keluarga berpenghasilan rendah dengan biaya yang

³³

BAPPENAS, Law Number 25/ 2000 on the National Development Program (Propenas) 2000-2004/ the Republic of Indonesia, (Jakarta: BAPPENAS, 2003), hal. 54.

wajar, serta menawarkan layanan perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan utama meliputi: menjaga kesinambungan pasokan dan cadangan bahan pokok; pengendalian harga bahan pokok; menawarkan layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan; memperluas jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan meningkatkan lingkungan hidup, termasuk akses terhadap air bersih.

Menurut Bank Dunia, cara pengentasan kemiskinan yang paling berhasil terdiri dari dua komponen yang saling bergantung dan sama nilainya, yaitu:

- a) Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki sumber pendapatan melalui strategi pembangunan yang mendorong pembangunan yang efektif. penggunaan tenaga kerja.
- b) Meningkatkan pelayanan publik (seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya) bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan keterampilan masyarakat untuk menggunakan kesempatan tersebut.³⁴

Heru Nugroho berpendapat bahwa karena kemiskinan merupakan konstruksi sosial, pembangunan saat ini justru melahirkan bentuk-bentuk dominasi baru. Dia menyarankan langkah-langkah pengentasan kemiskinan berikut sebagai hasilnya:

- a. Menstandarkan ukuran kemiskinan dan mengumpulkan statistik tentangnya

³⁴

Bagong Suyanto, Perangkap Kemiskinan Problem hal. 29

- b. Peningkatan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat kurang mampu dalam pembangunan
- c. Mempromosikan etos kerja yang kuat melalui konstruksi sosial
- d. Kemajuan sosial dan budaya
- e. Pembagian pendapatan yang merata.³⁵

Dua komponen utama strategi pengentasan kemiskinan Pemerintah adalah menolong masyarakat yang merasakan kemiskinan berat dengan memberdayakan mereka dan menangkal munculnya kemiskinan baru, serta menjaga keluarga dan masyarakat-masyarakat yang sementara mengalami kemiskinan. Pendekatan tersebut kemudian dituangkan dalam tiga inisiatif yang secara khusus menyasar masyarakat miskin, yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar mereka;
- 2) Menciptakan sistem jaminan sosial; dan
- 3) Menumbuhkan lingkungan yang ramah bisnis.

Orang miskin juga punya rencana sendiri untuk menaklukkan kemiskinan. Teknik yang digunakan adalah meminjam dari pemberi pinjaman tidak resmi, memperpanjang jam kerja, mempekerjakan anggota keluarga, pindah, atau menabung.

Berdasarkan kebiasaan dan praktik di berbagai negara, konsepsi kebijakan Pemerintah yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan dapat

³⁵ Heru Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hal. 38.

diidentifikasi teknik perencanaan yang mendukungnya. Menurut John Friedmann, setidaknya ada tiga jenis tradisi perencanaan:

- (1) Perencanaan sebagai reformasi sosial, di mana penyusunan dan perencanaan berbagai arah dan pedoman pembangunan agar diikuti dan dilakukan oleh masyarakat;
- (2) Perencanaan sebagai analisis kebijakan, dimana para pengambil keputusan yakni pemerintah atau pihak terkait lainnya merumuskan dan merencanakan segala arah dan pedoman pembangunan yang bisa diterima; dan
- (3) Perencanaan sebagai tradisi budaya yang dilakukan oleh masyarakat dan dimotivasi oleh berbagai gagasan yang telah ditanamkan dalam budaya dan jiwa mereka.

Metode perencanaan, model pembangunan yang dipakai dan pelaksanaan kegiatan semuanya dapat dievaluasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Peran Pemerintah daerah, masyarakat umum, dan penerima sasaran kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan di tingkat pemerintah dan masyarakat, merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menilai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan.³⁶

³⁶ Trimo Yulianto, Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (Berita Online djob.kemenkeu.go.id) Diakses 3 April 2023

2.6 Kesejahteraan Sosial

Agar warga negara dapat hidup dengan baik, berkembang secara pribadi, dan menjalankan peran sosialnya, perlu disediakan kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya. Inilah yang disebut dengan kesejahteraan sosial.³⁷ Tujuan kesejahteraan sosial, menurut Walter A. Fridlander, adalah membantu orang dan kelompok mencapai standar hidup, kesehatan yang memuaskan dan membangun hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mewujudkan potensi penuh mereka. Membantu peningkatan kesejahteraan mereka sambil tetap memperhatikan kebutuhan keluarga dan masyarakat.³⁸

Menurut definisi ini, sistem kesejahteraan sosial adalah sistem yang dapat menawarkan layanan sosial kepada orang, kelompok, dan masyarakat tertentu secara keseluruhan. Pelayanan sosial kemudian dapat membantu mereka yang kurang mampu atau terlambat dalam menyelesaikan tugas hidupnya, yang menguntungkan mereka baik secara finansial maupun sosial. Berikut tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

- a. Hentikan penyebaran dan eskalasi masalah kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan kelangsungan hidup, kualitas, dan tingkat kesejahteraan
- c. Untuk mencapai kemerdekaan, kembali ke fungsi sosial.
- d. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat untuk menghindari dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial
- e. Meningkatkan standar manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

³⁷ Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

³⁸ Fahrudin, A, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 9

2.6 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat keterkaitan antara fenomena yang diselidiki.³⁹ Penelitian deskriptif merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian deskriptif, fakta diperiksa secara metodologis dan disajikan dalam bentuk lebih mudah untuk dipahami dan ditarik kesimpulannya.⁴⁰

Temuan penelitian ini didiskusikan secara lisan atau tertulis, dan perilaku yang diamati dari subjek menerangi kesimpulan penelitian. Peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan secara menyeluruh peranan dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengentasan Kemiskinan.

3.2 Fokus Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji peranan dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam Pengentasan Kemiskinan serta konsekuensi dari elemen penghambatnya. Berikut ini adalah topik-topik yang menjadi fokus penelitian ini:

³⁹ Suharsimi Arikontu, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta) hal. 20

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar) hal. 3

Tabel 3.1
Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator	Sumber
1. Peran	1. Pemberdayaan. 2. Penyaluran bantuan sosial.	John M. Ivancevich, Robert dan Michael T. Matteson, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Tahun 2006.
2. Hambatan	1. Keakuratan Data 2. Anggaran	Endang Setiowati, Faktor Pendorong Keberhasilan Pemerintah, Tahun 2011.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan yang berlokasi di Jl. Pasar Merdeka No. 36, Padang, Kec. Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, kode pos: 23715, dimana tempat penelitian ini akan dilakukan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang mengkaji fakta dan sifat hubungan antara fenomena yang diteliti secara metodelis, faktual, dan tepat.

b. Sumber Data

Dua sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan di tempat melalui observasi lapangan dan percakapan dengan banyak orang yang relevan. Setelah menonton dan menanyai informan, daftar pertanyaan tertulis disajikan kepada mereka sebelum dialog disusun secara kronologis.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah bukti klaim penelitian ini yang berasal dari buku atau sumber tertulis lainnya, antara lain: Website, kitab undang-undang, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan tulisan ini.

3.5 Informan Penelitian

Informan untuk penelitian adalah mereka yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang masalah yang sedang diselidiki. *Purposive sampling*

digunakan untuk mengidentifikasi informan, dan ini melibatkan pemilihan informan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Status
1	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	1 Orang	Informan Utama
2	Pegawai Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	2 Orang	Informan Utama
3	Pendamping Sosial PKH	1 Orang	Informan Tambahan
4	Pendamping Desa	1 Orang	Informan Tambahan
5	Masyarakat miskin	3 Orang	Informan Kunci

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ini adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian:

1. Observasi

Tindakan mengamati langsung subjek penelitian seseorang dikenal sebagai observasi.⁴¹ Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait objek yang akan diteliti, observasi dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui studi langsung pada kondisi lingkungan dari topik penelitian

⁴¹ Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 51

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi atau menjalin kontak langsung dengan informan.⁴² Metode ini digunakan untuk mengumpulkan pernyataan verbal dari informan guna mengumpulkan informasi tidak tertulis dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini, yang kemudian dicatat dalam laporan ini.

3. Dokumentasi

Data yang diterima melalui dokumen diambil melalui dokumentasi.⁴³ Oleh karena itu, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumentasi berupa gambar atau foto, buku, dan arsip yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini sebagai pelengkap data primer.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini diverifikasi dengan menggunakan berbagai pendekatan; Namun, peneliti tidak menggunakan setiap metode yang tersedia. Sebaliknya, peneliti memilih metode yang sesuai untuk pengaturan penelitian.

Teknik yang digunakan peneliti untuk memverifikasi kebenaran data saat berbagi pekerjaan mereka adalah sebagai berikut:

⁴² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah III*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 4

⁴³ Husaini Usman dan Pornomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 224

1. Ketekunan Pengamatan

Dengan tujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri tersebut, pengamatan terus-menerus dilakukan terhadap faktor-faktor tersebut dalam konteks yang berkaitan dengan masalah dan masalah yang dicari, sebelum benar-benar puas dengan hal tersebut.⁴⁴

2. Triangulasi

Validasi keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi yang menggunakan metode lain. Dalam penelitian ini, tidak cukup hanya mengandalkan data dari hasil penelitian lapangan, sumber tambahan dari luar, seperti buku, catatan, dan lain sebagainya, juga harus diperhatikan.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002) hal. 329

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kabupaten Aceh Selatan

Salah satu undang-undang dasar pembentukan Provinsi Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia No. 1092), mendirikan Kabupaten Aceh Selatan, salah satu kabupaten paling awal di provinsi ini. Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas total 4.173,82 km² (417.382,50 ha), menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tarakan (RTRW). Baik potensi darat maupun potensi bahari, serta muatan yang dimiliki kabupaten menawarkan prospek pengembangan yang sangat luas. Berikut penjelasan batas-batas kawasan:

Tabel 4.1

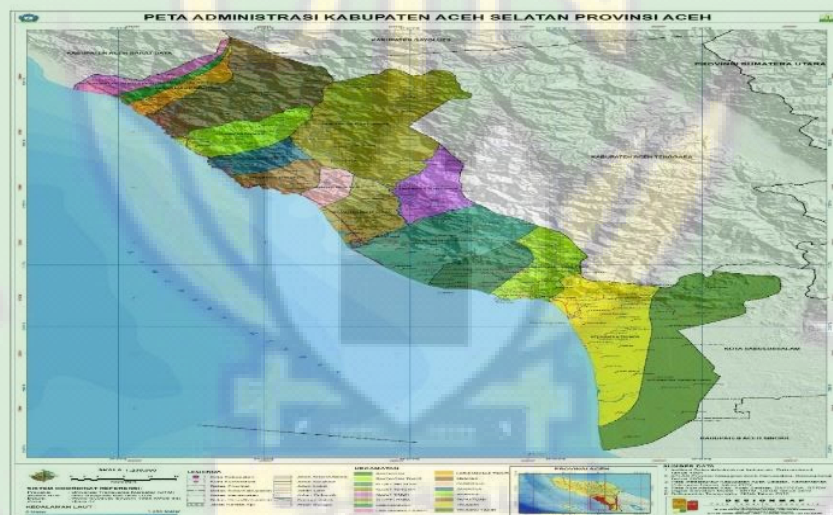
Batasan Wilayah

No	Bagian	Batasan Wilayah
1	Bagian Utara	Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues
2	Bagian Selatan	Berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
3	Bagian Barat	Berbatasan dengan Samudra Hindia
4	Bagian Timur	Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan

Kantor pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, Tapaktuan, terkenal dengan prospek luar biasa untuk pariwisata lokal dan internasional. Kota ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata di daerah tersebut, karena terdapat 16 dari 111 tempat wisata potensial yang terletak di kabupaten tersebut. Sayangnya, pemerintah daerah belum memanfaatkan potensi tersebut dengan sebaik-baiknya, karena dianggap belum tertata dalam upaya pengembangan tempat wisata. Hal ini terlihat dari minimnya infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di daerah tersebut.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Aceh Selatan



Sumber : <http://portal.acehselatankab.go.id/itentang-aceh-selatan>

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi sumber daya laut yang luar biasa, merupakan sumber mata pencaharian penting bagi hampir 70% penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Perekonomian kabupaten sangat bergantung pada pengembangan hasil laut. Selain itu, sektor pertanian di daerah tersebut juga berkembang pesat, dengan banyak penduduk setempat yang bertani.

Gambar 4.2 Logo Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan



Sumber : Pemda Aceh Selatan 2022

Sebagaimana termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan, Mewujudkan Aceh Selatan yang Berkeadilan Sosial Ekonomi adalah cita-cita Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pemerintah Aceh Selatan memiliki misi untuk mensosialisasikan visi tersebut, antara lain:

- a. Mewujudkan budaya dan prinsip syariah Islam dalam interaksi sosial sehari-hari.
- b. Membangun generasi muda yang berdaya saing nasional dan berkualitas.
- c. Memastikan integrasi manfaat sosial yang mulus, akses sederhana ke layanan kesehatan berkualitas tinggi, dan faktor lainnya.
- d. Memperkuat sistem perencanaan wilayah yang efektif dan efisien.
- e. Menyederhanakan struktur pelayanan birokrasi dalam pemerintahan.
- f. Penyediaan infrastruktur penting dan tulang punggungnya secara merata dan adil.
- g. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan prospek lapangan kerja di industri manufaktur dan jasa.

- h. Memantapkan industri pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menopang perekonomian masyarakat.
- i. Mewujudkan pertumbuhan industri, pusat produksi, dan sektor kreatif yang berdaya saing.
- j. Terciptanya sektor dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Sebuah organisasi pemerintah bernama Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan bekerja untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Tanggung jawab Dinas Sosial adalah membantu bupati dalam mengelola urusan negara yang berkaitan dengan bidang sosial. Dinas Sosial merupakan bagian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos). Kementerian yang bertugas mengatur dan mengawasi urusan dalam negeri adalah Kementerian ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mendukung presiden di bidang sosial.



Gambar 4.3 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan berkedudukan di Tapaktuan dan dijalankan oleh Bapak Junaidi, SP selaku Kepala Dinas. Berkaitan dengan terwujudnya Aceh Selatan yang berkeadilan sosial dan ekonomi, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan memiliki visi. Tentunya dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tugas dan fungsinya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan dinas sosial merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut.

4.1.2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya, tentunya visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah juga dimiliki oleh dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan. Visi, misi, maksud, dan tujuan dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Visi
"Terwujudnya Aceh Selatan yang berkeadilan sosial ekonomi"
2. Misi
Misi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam interaksi sosial sehari-hari.
 - b. Membangun generasi muda yang berdaya saing nasional dan berkualitas.

- c. Memastikan integrasi bantuan sosial yang mulus dengan akses mudah ke layanan kesehatan berkualitas tinggi.
- d. Memperkuat sistem perencanaan wilayah yang efektif dan efisien.
- e. Menyederhanakan struktur pelayanan birokrasi dalam pemerintahan.
- f. Penyediaan infrastruktur dan bantuan yang merata dan adil.
- g. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan prospek lapangan kerja di industri manufaktur dan jasa.
- h. Meningkatkan industri pertanian, perkebunan, dan perikanan serta basis produksi masyarakat.
- i. Memahami pertumbuhan hub produksi, industri, dan sektor inovatif dan produktif.
- j. Pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat tujuan misi yang harus dicapai, berikut merupakan tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan :

- a. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintahan yang demokratis dan transparan.
- b. Meningkatkan perencanaan yang berkualitas.
- c. Meningkatkan akses pelayanan sosial bagi PMKS.
- d. Meningkatkan profesionalisme dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial.

4. Sasaran

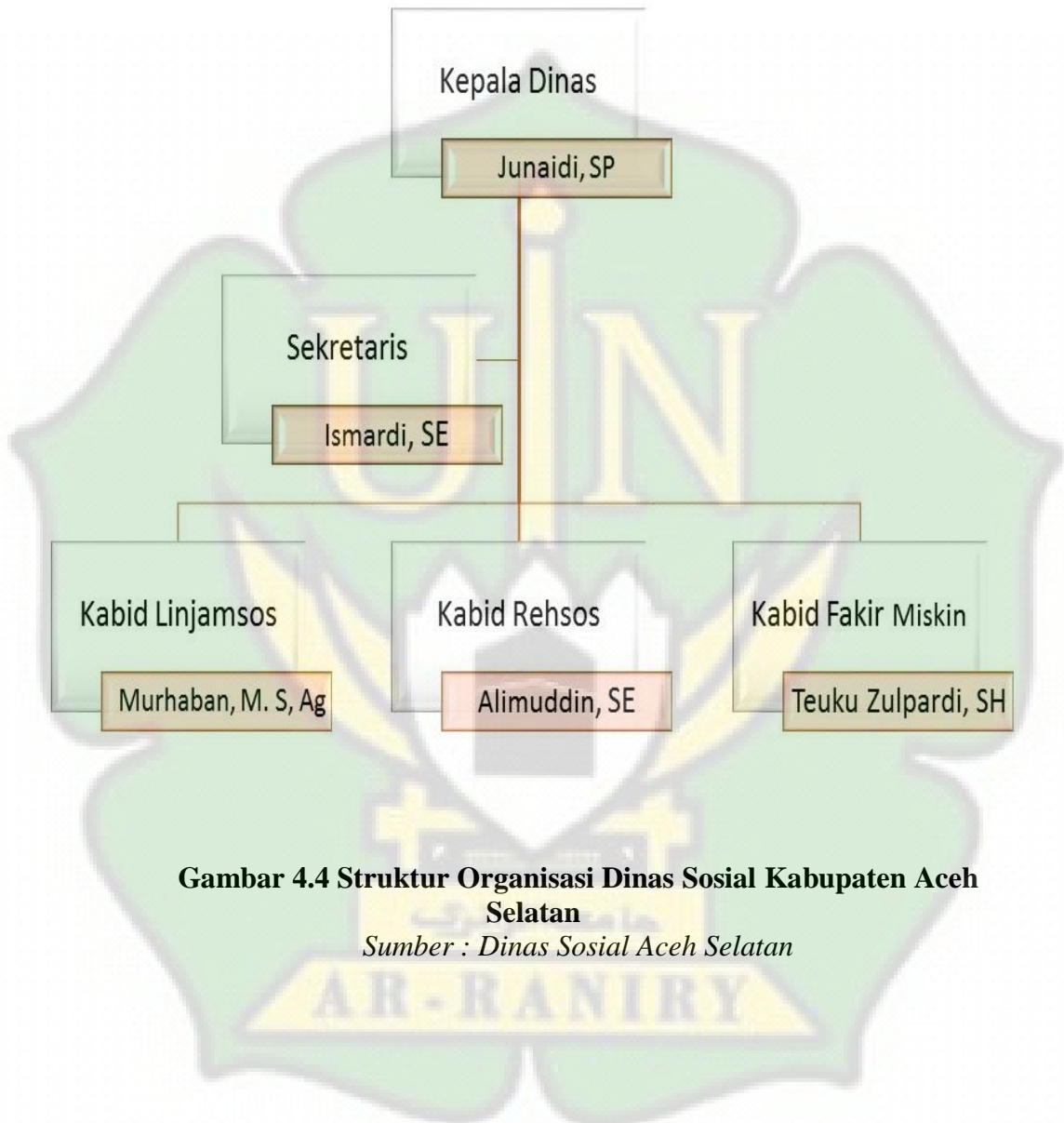
Sasaran adalah penjabaran dari sebuah tujuan yang sudah ditentukan yakni berupa hasil yang akan dicapai dan memiliki jangka waktu. Adapun sasaran dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan yaitu :

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin
- b. Memberi masyarakat adat yang terisolasi akses ke sumber daya sosial dan ekonomi
- c. Meningkatkan bakat dan wawasan penyandang disabilitas
- d. Mengurus kebutuhan sosial ekonomi anak terlantar dan melindungi mereka dari bahaya
- e. Mempertahankan kehidupan warga lanjut usia
- f. Rehabilitasi individu dengan gangguan sosial
- g. Kesiapsiagaan bencana dan perlindungan masyarakat.

4.1.2.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang dirancang untuk menentukan bagaimana ia dapat beroperasi sesuai dengan hierarki untuk mencapai suatu tujuan. Masing-masing bidang memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan di bawah struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Struktur organisasi dibuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan organisasi layanan sosial berjalan dengan lancar, mudah, efektif, dan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang relevan.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



4.1.3 Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kecamatan tahun 2023

Kecamatan	Ruta	Jiwa	KK	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Menuju Midle Class
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Trumon	Nihil	6713	1954	469	1071	Nihil	Nihil	Nihil
Trumon Timur	Nihil	4996	1456	376	817	Nihil	Nihil	Nihil
Trumon Tengah	Nihil	4920	1452	319	803	Nihil	Nihil	Nihil
Bakongan	Nihil	5307	1608	366	866	Nihil	Nihil	Nihil
Bakongan Timur	Nihil	6331	1967	527	1086	Nihil	Nihil	Nihil
Kota Bahagia	Nihil	3714	1142	217	402	Nihil	Nihil	Nihil
Kluet Selatan	Nihil	11033	3489	726	1770	Nihil	Nihil	Nihil
Kluet Timur	Nihil	7841	2465	537	1152	Nihil	Nihil	Nihil
Kluet Utara	Nihil	6396	1997	362	1043	Nihil	Nihil	Nihil
Pasie Raja	Nihil	19167	5946	1011	2637	Nihil	Nihil	Nihil
Kluet	Nihil	14956	4497	988	1910	Nihil	Nihil	Nihil

Tengah								
Tapaktuan	Nihil	9992	3424	187	853	Nihil	Nihil	Nihil
Samadua	Nihil	10413	3437	290	1005	Nihil	Nihil	Nihil
Sawang	Nihil	12144	4842	489	1205	Nihil	Nihil	Nihil
Meukek	Nihil	16068	5190	762	2459	Nihil	Nihil	Nihil
Labuhan Haji	Nihil	8786	2842	490	1152	Nihil	Nihil	Nihil
Labuhan Haji Timur	Nihil	10054	3242	319	916	Nihil	Nihil	Nihil
Labuhan Haji Barat	Nihil	13068	4382	768	2010	Nihil	Nihil	Nihil
Aceh Selatan	Nihil	172349	54332	9203	23157	Nihil	Nihil	Nihil

Note : Nihil (Tidak ada data yang tersedia)

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

4.2 Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2023, dalam studi ini dibahas kontribusi dinas sosial terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Kajian ini berfokus pada peran dinas sosial dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan

serta tantangan yang dihadapi dinas sosial dalam menjalankannya. Temuan dan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

4.2.1 Peran Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan

Tak bisa dipungkiri, masalah kemiskinan bukanlah sebuah keinginan, begitu pula mereka yang kurang mampu atau melarat. Kemiskinan adalah keadaan kekurangan yang ada di beberapa sektor masyarakat. Adapun indikator dari kemiskinan adalah merujuk kepada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, produktifitas serta efektifitas kerja, pendapatan yang diperoleh, kualitas kesehatan dan gizi serta kesejahteraan dari masyarakat. Orang yang dianggap miskin memiliki sedikit sumber daya manusia, yang merupakan akar dari kemiskinan, serta terbatasnya pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat, pemerintah tentunya telah menyiapkan berbagai kebijakan serta badan atau dinas untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh pemerintahan, tanpa peranan maksimal dari pemerintah tentunya masalah kemiskinan sulit untuk diatasi atau ditanggulangi oleh masyarakat. Dinas sosial merupakan salah satu lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah secara khusus untuk mengatasi permasalahan sosial yang melanda masyarakat, dinas ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk menata serta meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat kearah yang lebih baik serta lebih sejahtera untuk kedepannya.

Permasalahan kemiskinan ini juga melanda di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, sehingga banyak tuntutan serta harapan masyarakat miskin kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Apabila kita amati, menurut alinea keempat UUD 1945, salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah mengangkat masalah kesejahteraan umum. Masalah kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat telah menjadi visi dan misi Kabupaten Aceh Selatan, bahkan di dalam kabupaten itu sendiri.

Tujuan Kabupaten Aceh Selatan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan ekonomi, dan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan tenaga kerja lokal melalui perluasan kesempatan kerja di industri manufaktur dan jasa. Maka permasalahan kemiskinan ini menjadi program utama yang dijalankan oleh pemerintah, lembaga khusus yang mengatasi permasalahan kemiskinan di Aceh Selatan adalah dinas sosial kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pendamping Sosial PKH Kabupaten Aceh Selatan Bakri Abbas, S.TH., mengatakan bahwa :

“...Permasalahan kemiskinan juga melanda di Kabupaten Aceh Selatan ini, tentunya peranan dari pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat. Dinas Sosial adalah instansi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan sosial ini secara khusus. Tentunya kita berharap bahwasanya Dinas Sosial mampu membantu masyarakat untuk menghadapi kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kan cita-cita negara juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bukan. Salah satu peran dari dinas sosial dalam hal ini adalah memberikan pemberdayaan

kepada masyarakat baik berupa bimbingan maupun penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraannya...”⁴⁵

Dari penulis bersama Bakri Abbas, S.TH selaku pendamping sosial pkh Aceh Selatan, dapat diketahui bahwa dinas sosial merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengatasi permasalahan sosial di Kabupaten Aceh Selatan secara khusus. Menurutnya, peranan yang dimiliki oleh dinas sosial sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Zulpardi, SH., MM mengatakan bahwa :

“...kemiskinan merupakan permasalahan yang besar serta umum yang terjadi Indonesia, bahkan di Kabupaten Aceh Selatan ini juga menghadapi permasalahan kemiskinan ini. Kami dari jajaran Dinas Sosial Aceh Selatan sangat berupaya untuk mengatasi permasalahan ini, terlebih sudah tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada kami. Mungkin peranan yang hanya dilihat oleh masyarakat dari dinas sosial ini adalah memberikan bantuan baik pangan maupun non pangan seperti PKH, BPNT, dan lain sebagainya bagi masyarakat yang kurang mampu, padahal berbagai kebijakan telah dibuat dan dijalankan oleh pemerintah yang diwenangkan juga kepada dinas sosial ini. Adapun peran inti sebenarnya adalah memberikan penyuluhan serta bimbingan kepada masyarakat. Kita berharap untuk kedepannya, dinas sosial Kabupaten Aceh Selatan bisa untuk hadir dan membantu masyarakat mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Terlebih visi dan misi Aceh Selatan juga mengacu kepada hal demikian...”⁴⁶

Selanjutnya ditambahkan oleh Herry Febriansyah, SE selaku pegawai Dinas Sosial Aceh Selatan, mengatakan bahwa :

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Pendamping Sosial PKH, Bakri Abbas, S.TH pada tanggal 7 mei 2023

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Zulpardi, SH., MM pada tanggal 2 Mei 2023

“...Harapan kita dari dinas sosial dan masyarakat adalah setiap tahun itu ada penurunan tingkat kemiskinan, minimal tentunya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat ini tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh dinas sosial saja, tentunya kita banyak membutuhkan kerjasama baik antar lembaga pemerintahan, LSM, utamanya dari kalangan masyarakat itu sendiri...”⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas, kita mengetahui bahwasanya berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Aceh Selatan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Peranan yang dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat yaitu seperti penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu, dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan.

Kesejahteraan merupakan keinginan seluruh masyarakat, tentunya tidak ada yang ingin hidup dibawah garis kemiskinan. Hingga tahun 2023 ini, pemerintahan serta dinas sosial telah berupaya mengatasi permasalahan sosial ini. Banyak kebijakan serta program yang telah direalisasikan, bahkan dalam rangka memutus rantai kemiskinan Dinas Sosial telah berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, seperti di Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama salah satu Pendamping desa di Kabupaten Aceh Selatan Hamdimus, SE., mengatakan bahwa :

“...dalam rangka melakukan pendampingan desa, saya pribadi banyak mendengar keluhan masyarakat seputar kasus perokonomian seperti pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu, memiliki harapan agar dapat selalu dibantu oleh pemerintah.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Herry Febriansyah, SE pada tanggal 3 Mei 2023

Masalah ini adalah bagian dari permasalahan sosial, bakti sosial tidak diragukan lagi merupakan salah satu organisasi yang bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini. Sejauh ini, peran dari Dinas Sosial sudah sangat baik seperti melakukan penyuluhan dan pembagian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu...”⁴⁸

Dari hasil wawancara tersebut, kita mengetahui bahwasanya masyarakat yang kurang mampu banyak yang menaruh harapan kepada pemerintah khususnya dinas sosial di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan adanya bantuan yang diberikan, ini pasti akan sangat membantu yang kurang beruntung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejauh ini, peran dari Dinas Sosial sudah sangat baik dan membekas dalam kehidupan masyarakat dalam mengentas kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama masyarakat penerima bantuan sosial di Kabupaten Aceh Selatan, Melissa. Mengatakan bahwa :

“...Penyediaan dukungan pemerintah sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan ini seakan menjadi berkah yang memudahkan kami dalam rangka melanjutkan hidup. Tentunya kami berharap, pemerintah khususnya dinas sosial mampu untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi permasalahan kemiskinan...”⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah, khususnya Dinas Sosial, sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya harapan masyarakat adalah pemerintah serta dinas sosial mampu untuk meningkatkan kinerjanya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Pendamping Desa, Hamdimus, SE pada tanggal 8 Mei 2023

⁴⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat miskin/penerima bantuan sosial, Melissa pada tanggal 6 Mei 2023

dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, maka dalam pengambilan setiap kebijakannya diharapkan pemerintah mengedepan keinginan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis menemukan bahwasanya Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Namun di masa depan, peneliti berharap peran dari dinas sosial dapat dioptimalkan lagi dalam rangka mengentas atau mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat seperti kemiskinan. Terlebih untuk menyongsong Indonesia sebagai negara maju, maka kesejahteraan masyarakat adalah faktor utama yang harus segera diatasi oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti melihat bahwa Dinas Sosial memiliki telah berupaya untuk mengentas kemiskinan. Adapun peran Dinas Sosial dalam mengentas kemiskinan di Aceh Selatan adalah :

4.2.1.1 Melakukan Pemberdayaan

Untuk mengentas masalah kemiskinan pada masyarakat, dinas sosial merupakan perpanjangan tangan dari bupati untuk mengatasi permasalahan tersebut serta membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahateranaanya. Dinas sosial, Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dibangun secara struktural. Bidang ini harus melakukan kewajiban dan tugas tertentu daripada tugas kepala dinas yang terdiri atas perencanaan kegiatan pemberdayaan, menyusun pedoman serta petunjuk teknis dari pemberdayaan, melakukan pembinaan kepada masyarakat miskin serta menyelenggarakan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh bakti sosial bagi masyarakat miskin menjadikannya salah satu inisiatif efektif yang harus dilakukan oleh pemerintah tentunya akan memberikan perubahan yang besar bagi kehidupan masyarakat tersebut pada tahap selanjutnya. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pembinaan serta pembimbingan kepada masyarakat yang kurang mampu, bahkan kegunaan pemberdayaan ini dalam membantu penduduk miskin mendapatkan pelatihan.

Dinas Sosial di Kabupaten Aceh Selatan, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat fakir miskin sebagai bentuk upaya dan usaha mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta salah satu langkah untuk mengentas permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan, hingga tahun ini Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan berupaya secara maksimal untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kabid Pembemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin Kabupaten Aceh Selatan, Zulparidi, SH., MM., mengatakan bahwa ;

“...Kemiskinan di kabupaten Aceh Selatan itu memang setiap tahun terjadi penurunan. Cuma pada saat covid, kita agak naik lagi tingkat kemiskinan. Aceh Selatan menempati urutan ketiga di antara kabupaten dan kota Aceh. Saya pikir kalau masalah tingkat kemiskinan naik turun itu sangat berpengaruh dengan perekonomian masyarakat. Kalau memang ekonomi masyarakat itu lancar, saya pikir setiap tahun kabupaten Aceh Selatan itu selalu mengalami penurunan angka kemiskinan, walaupun jumlahnya 0. Pengurangan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja; itu juga membutuhkan kerjasama dengan lembaga atau lembaga lain. Tugas Dinas Sosial dalam situasi ini adalah mengumpulkan informasi tentang orang-orang dari kelas sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan, dan menengah. Data itu nanti kita bawa

bersama dinas lain, disitulah kita akan rumuskan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan wewenang daripada dinas masing-masing. Hingga saat ini, salah satu upaya yang kami lakukan dalam meminimalisir kemiskinan di Aceh Selatan adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kurang mampu...”⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwasanya pemberdayaan ini sangat membantu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, Dinas Sosial akan menjalankan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kesempurnaan dari pemberdayaan ini. dalam melakukan pemberdayaan sosial kepada masyarakat, Dinas Sosial akan mengacu kepada pendataan sensus penduduk untuk mengetahui sebaran serta jumlah masyarakat yang kurang mampu di Aceh Selatan. Pemberdayaan yang dilakukan adalah pembinaan serta arahan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama pegawai Dinas Sosial Aceh Selatan, Herry Febriansyah, SE mengatakan bahwa :

“...dalam rangka mengentas kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan. Akan tetapi, yang teratur itu kita lihat dari pemberdayaan. Artinya apa yang dilakukan dalam hal pengentasan kemiskinan kita bimbing dari awal sampai pada masanya seseorang itu keluar daripada status kemiskinan. Dinas Sosial dalam hal ini memiliki fungsi dan peran sebagai fasilitator pemberdayaan kepada masyarakat kurang mampu. Tentunya, dengan dilakukan pemberdayaan ini masyarakat akan semakin berkembang serta dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya...”⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Zulpardi, SH., MM pada tanggal 2 Mei 2023

⁵¹ Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Herry Febriansyah, SE pada tanggal 3 Mei 2023

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasanya pemberdayaan merupakan salah satu kunci serta cara yang efektif untuk mengentas permasalahan kemiskinan. Adapun pemberdayaan lainnya yang dilakukan oleh dinas sosial di Kabupaten Aceh Selatan adalah membimbing masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan ekonominya dari tahap awal hingga mencapai hasil atau target yang diinginkan, sehingga pemberdayaan ini dapat dikatakan sebagai langkah dan upaya untuk membawa masyarakat kearah yang lebih baik secara ekonomi.

Menurut Pendamping Sosial PKH Kabupaten Aceh Selatan, Bakri Abbas, S.TH mengatakan bahwa :

“...Setiap inisiatif dan kebijakan pemerintah serta pemberdayaan yang diberikan oleh dinas-dinas sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan pasti berdampak pada masyarakat. Tentunya pemberdayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, dengan adanya pemberdayaan tentu dalam tahap selanjutnya masyarakat juga bisa secara mandiri untuk meningkatkan ekonominya...”⁵²

Berdasarkan temuan penelitian lapangan penulis di Kabupaten Aceh Selatan, peneliti berpendapat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan lebih banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat setempat. Adapun bentuk dari pemberdayaan yang dilakukan adalah :

1. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat kurang mampu (fakir miskin) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

⁵² Hasil wawancara dengan Pendamping Sosial PKH, Bakri Abbas, STH pada tanggal 7 Mei 2023

2. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk melakukan pembinaan serta bimbingan teknis dalam mengembangkan usaha masyarakat seperti UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah yang mayoritas dijalankan oleh masyarakat yang kurang mampu.
3. Dalam melakukan pemberdayaan ini, dinas sosial menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Seperti dengan gampong-gampong untuk pendataan masyarakat kurang mampu, serta dengan pihak lainnya yang mampu memberdayakan masyarakat.

4.2.1.2 Memberikan Bantuan Sosial

Masyarakat dapat langsung melihat dan merasakan peran pemerintah dan Dinas Sosial yang sangat nyata dalam masyarakat adalah dalam bentuk penyaluran bantuan sosial, bantuan ini sejatinya merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk dapat membantu masyarakat secara langsung baik melalui benda, uang dll. Bantuan sosial ini merupakan sebuah upaya yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat kurang mampu tentu sangat mengharapkan bantuan sosial dalam rangka memenuhi serta meneruskan hidupnya seperti dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak berlangsung terus-menerus dan bersifat memilih, biasanya berupa uang atau barang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kebijakan

ini diambil oleh pemerintah dengan tujuan mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus upaya untuk mengentas permasalahan kemiskinan. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu adalah Dinas Sosial, terlebih kemiskinan merupakan salah permasalahan sosial yang harus diatasi oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Aceh Selatan, Zulpardi, SH., MM., mengatakan bahwa :

“...Salah satu langkah atau upaya yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah menyalurkan bantuan sosial atau bansos, kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Kontribusi dari Dinas Sosial sendiri adalah menjadi lembaga atau pihak yang menyalurkan bantuan sosial tersebut secara langsung kepada masyarakat, dimana bantuan sosial yang diluncurkan itu tidak sedikit, contoh misalnya seperti bantuan program sembako yang diluncurkan oleh kementerian sosial, itu kan hampir setiap bulan atau dua bulan sekali mereka terima. Belum lagi PKH, kan sangat membantu pengeluaran masyarakat dan juga mempermudah proses pengentasan kemiskinan...”⁵³

Dari wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwasanya bantuan sosial atau bansos adalah upaya yang diambil oleh pemerintah dengan maksud membantu serta meringankan beban masyarakat secara ekonomi. Bantuan sosial ini dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yakni bantuan tunai dan bantuan non-tunai. Dinas sosial adalah salah satu pihak yang ditugaskan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, dengan adanya bantuan ini diharapkan permasalahan kemiskinan dapat menurun serta mampu diatasi oleh pemerintahan.

⁵³

Hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Zulpardi, SH., MM

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti bersama pegawai Dinas Sosial

Kabupaten Aceh Selatan, Elly Daswita, SE mengatakan bahwa :

“...Masyarakat, terutama yang kurang mampu, sangat menjunjung tinggi bantuan sosial sebagai kebijakan dan contoh nyata upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, seperti di Kabupaten Aceh Selatan. Dinas Sosial dibawah Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk mendata serta menyalurkan bantuan ini, ada beberapa kriteria dalam menetapkan penerima bantuan. Kalau dulu berdasarkan, desil ada desil 1, desil 2, 3,4. Desil itu ditentukan dari poin-poin melalui semua aset yang mereka miliki. Misalnya punya mobil, rumah semuanya mempunyai poin masing-masing. Tergantung pada faktor ini, seseorang akan jatuh ke dalam kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan terhadap kemiskinan, atau kelas menengah. Kriterianya sekarang tinggal 9, apakah seseorang itu memiliki tempat tinggal, apakah kepala rumah tangga bekerja, secara lengkap kriteria ini dapat dilihat dalam Permensos 262/2022...”⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas, kita mengetahui bahwa bantuan sosial merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat dalam rangka mengentas kemiskinan atau mengatasi permasalahan ekonomi. Dalam implementasinya, bantuan sosial diperuntukkan khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan sosial ini memiliki kuota penerima, tidak semua masyarakat dapat dibantu untuk diberikan bantuan sosial. Ada kriteria atau persyaratan atau indikator tertentu yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan penerima bantuan sosial. Dinas sosial Aceh Selatan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menetapkan serta menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat atau penerima.

⁵⁴

Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Elly Daswita, SE pada tanggal 3 Mei 2023

Dari hasil wawancara bersama salah satu masyarakat penerima bantuan sosial di Aceh Selatan, Melissa mengatakan :

“...Dukungan yang kami terima dari pemerintah sangat bermanfaat bagi kami, dan tentunya akan mengurangi beban mereka yang kurang beruntung. Saya sendiri adalah penerima bansos PKH (Rp. 225.000 /3 bulan) dan BPNT (Rp. 200.000 perbulan). Semoga bantuan seperti ini dapat diselalu disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu...”⁵⁵

Ditambahkan oleh hasil wawancara bersama masyarakat lainnya yang juga penerima bantuan sosial di Aceh Selatan, Sunaria mengatakan :

“...bantuan sosial merupakan harapan dari masyarakat kurang mampu kepada pemerintah, kalau bukan pemerintah yang membantu masyarakatnya ya siapa lagi. Saya sangat bersyukur dibantu oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian kami, bantuan ini akan memudahkan saya untuk memenuhi kebutuhan. Saya sendiri adalah penerima bantuan sosial PKH (Rp. 1.100.000 /3 bulan) dan BPBT (Rp. 200.000 perbulan)...”⁵⁶

Serta masyarakat lainnya, atas nama Yusrimayanti mengatakan bahwa :

“...masyarakat seperti kami, sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Program bantuan sosial pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan bagi kehidupan kita, bantuan yang disalurkan oleh dinas sosial seakan menjadi perantara kami menuju hidup yang lebih baik. Saya adalah salah satu penerima bantuan sosial PKH (Rp. 600.000/3bulan) BNPT (Rp. 200.000 perbulan), saya pribadi berharap bantuan yang seperti selalu dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan...”⁵⁷

⁵⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat miskin/penerima bantuan sosial, Melissa pada tanggal 6 Mei 2023

⁵⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat miskin/penerima bantuan sosial, Sunaria pada tanggal 6 Mei 2023

⁵⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat miskin/penerima bantuan sosial, Sunaria pada tanggal 6 Mei 2023

Bantuan sosial pemerintah seolah menjadi pengobatan atau solusi bagi masyarakat atas permasalahan kemiskinan yang mereka hadapi, dan bantuan ini merupakan sarana bertujuan untuk mengentas kemiskinan dengan harapan dapat menurunkan dan mengatasi angka kemiskinan dalam kehidupan masyarakat. Program pemberian bantuan sosial ini telah lama dijalankan oleh pemerintahan, tentunya kita berharap bantuan ini dapat direalisasikan selalu.

Adapun bantuan sosial yang saat ini telah diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka menentas kemiskinan diantaranya adalah :

1. Bantuan Keluarga Harapan (PKH)

Bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH, PKH adalah program bantuan sosial bersyarat. berdasarkan temuan riset lapangan, peneliti melihat bahwa bantuan PKH telah disalurkan dengan baik di Kabupaten Aceh Selatan.

2. Bantuan BNPT

Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT adalah bantuan sosial pangan yang diberikan setiap bulan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk kartu sembako. Dengan rincian perolehan bansos perbulan Rp200 ribu.

Berdasarkan temuan lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat setempat merupakan salah satu fungsi Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Kebijakan ini merupakan sebuah jalan yang diambil untuk membantu kehidupan masyarakat

agar lebih baik lagi kedepannya, sejatinya bantuan ini diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu. Dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, Dinas Sosial terlebih dahulu akan melakukan pendataan mengenai jumlah masyarakat yang kurang mampu dan layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah.

4.3 Hambatan Dinas Sosial Dalam Mengentas Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan

Pengentasan kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah diatasi oleh pemerintahan serta Dinas Sosial, tentunya terdapat hambatan yang terjadi dalam menjalankan program atau kebijakan yang diambil. Tantangan tersebut dapat muncul baik dari masyarakat maupun instansi pemerintah atau dinas sosial itu sendiri. Dampak yang dapat terjadi atas hambatan yang ditemukan adalah prospek dari pengentasan kemiskinan akan susah dijalankan, serta dalam mengentas kemiskinan menjadi lebih lama dari yang diharapkan.

Menurut Kabid Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Aceh Selatan, Zulparidi, SH., MM mengatakan :

“...Pada tahun 2023 ini kami mencoba membuat aplikasi yang hampir persis seperti sistem informasi kesejahteraan sosial yang ada di kemensos, basis datanya sama tetapi pada saat pengimputan nanti kita akan cek ulang. Nanti setiap data yang akan dimasukkan harus betul-betul real sesuai dengan kenyataan. Mungkin ini masih memerlukan pengembangan juga, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang bisa diperbaiki, jadi pada saat launching bisa diakses semua orang. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sebelumnya yang ditemui, yang mana terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam rangka mengentas kemiskinan di Aceh Selatan. Kendalanya memang di masalah data kemiskinan. Dimana memang data

kemiskinan itu belum sempurna, mengingat data yang kita pergunakan itu masih data daripada sistem informasi kesejahteraan sosial. Memang setiap bulan kita mengupdate, tetapi yang mengupdatenya kan bukan satu orang. Jadi kan setiap desa itu kita ada petugas registrasi gampong. Setiap desa itu ada 2 orang, apakah disaat mereka mengupdate data itu memang-memang sesuai dengan kenyataannya atau tidak. Kan itu masalahnya sekarang...”⁵⁸

Dari wawancara diatas, kita mengetahui bahwasanya Dinas Sosial di Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki hambatan dalam rangka mengentas kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun hambatan pertama yang dirasakan oleh dinas sosial adalah data penduduk serta penerima bantuan tidak akurat, dan data ini sangatlah menentukan keberhasilan dari kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan pemerintah seperti penyaluran bantuan untuk mengentas permasalahan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.

Selanjutnya menurut salah satu pegawai Dinas Sosial Aceh Selatan, Herry Febriansyah, SE mengatakan bahwa :

“...Kalau masalah yang timbul tidak ada dalam mengentas kemiskinan ini, yang ada ialah paling orang minta bantuan semua. Kenapa saya tidak dapat, kenapa ini dapat. Salah satunya kenapa ada yang tidak dapat, karena dikemensos itu kan sudah ada kuota. Memang ada yang layak belum dapat tetapi banyak permasalahan, contoh mereka dulu sudah dapat tetapi disaat di online kan data, antara di ktp dan buku rekening berbeda nama atau antara nik di ktp dan kk beda. Cuma kadang-kadang yang sering terjadi, kementerian sosial itu saat memberikan bantuan datanya tidak dipertanyakan, ada yang sudah kita usulkan layak tetapi kadang-kadang yang sudah meninggal keluar namanya lagi padahal kita sudah hapus. Nah itu yang menjadi pertanyaan krusial. Padahal apabila kita menyadari dan memahami, keterbatasan anggaran adalah

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Zulpardi, SH.,MM pada tanggal 2 Mei 2023

hambatan utama dalam mengentas kemiskinan seperti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat...”⁵⁹

Ditambahkan oleh hasil wawancara bersama Pendamping Sosial PKH di Aceh Selatan, Bakri Abbas, S.TH mengatakan :

“...permasalahan pengentasan kemiskinan ini bukan sebuah hal yang mudah untuk diatas oleh kita, tentunya banyak hambatan serta tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan. Saya rasa, Dinas Sosial juga memiliki hambatan dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi masalah sosial. Terlebih pola pikir masyarakat yang masih kebanyakan belum berubah atau jalan ditempat, yang hanya mengharapkan bantuan seperti PKH ini...”⁶⁰

Dari wawancara diatas, kita mengetahui bahwasanya pengentasan kemiskinan bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak hambatan yang terjadi dalam menjalankan kebijakan tersebut, bahkan hambatan ini juga berasal dari kalangan masyarakat itu sendiri. Dinas Sosial dalam hal ini, seharusnya berupaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan cara menemukan solusi terbaik untuk masalah yang muncul.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa hambatan dinas sosial dalam rangka mengentas kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun hambatan tersebut adalah :

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Febriansyah, SE pada tanggal 3 Mei 2023

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Pendamping Sosial PKH, Bakri Abbas, S.TH, pada tanggal 7 Mei 2023

4.3.1.1 Data Tidak Akurat

Hambatan utama yang dirasakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam mengentaskan kemiskinan berasal dari pendataan, yang mana data penduduk yang dinyatakan kurang mampu tidak akurat. Tidak dapat dipungkiri, bahwasanya data penduduk adalah acuan utama pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakannya. Seperti dalam mengatasi kemiskinan, penyuluran bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah haruslah merujuk kepada data yang dimiliki.

Menurut Kabid Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Aceh Selatan, Zulpardi, SH., MM mengatakan :

“...data penduduk merupakan acuan utama dari kami dalam menjalankan tugas serta fungsi dari dinas sosial, kita baru mengetahui kondisi masyarakat berdasarkan data yang ada. Dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu (fakir miskin) datanya masih belum akurat, hal ini terlihat saat memberikan bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Banyak yang dikategorikan tidak layak tetapi menjadi penerima bantuan, dan begitu juga sebaliknya masyarakat yang dikategorikan layak tetapi tidak terdata dan tidak terpilih sebagai penerima bantuan sosial yang sudah dialokasikan oleh pemerintah...”⁶¹

Dari wawancara diatas, kita mengetahui bahwa benar adanya ketidakakuratan data penduduk. Padahal keakuratan data itu sangat penting agar penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Tentunya masalah ini sangat disayangkan apabila tidak segera dievaluasi.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Zulpardi, SH.,MM pada tanggal 2 Mei 2023

Selanjutnya menurut salah satu Pendamping Desa di Kabupaten Aceh

Selatan, Hamdimus, SE mengatakan bahwa :

“...pendataan penduduk perlu dioptimalkan lagi oleh petugas registrasi gampong, masih banyak ketidaksesuaian data dengan realita yang ada. Bahkan seperti angka kemiskinan dan penerima bantuan, saya rasa masih harus dievaluasi kembali. Sangat disayangkan apabila data itu tidak sesuai, kan acuan dari pemerintah untuk menjalankan kebijakannya adalah bergantung kepada data kependudukan...”⁶²

Permasalahan pendataan penduduk seharusnya mampu dijalankan secara maksimal dan professional oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk mendata baik dari gampong hingga ke Disdukcapil, apabila pendataan ini tidak dilakukan dengan maksimal dapat berdampak kepada lamanya waktu yang dibutuhkan dalam rangka mengentas kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Untuk mengatasi permasalahan kesimpang siuran data penduduk yang tidak akurat, pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan haruslah mengambil sebuah langkah tegas serta melakukan evaluasi ulang terhadap pendataan penduduk.

Dalam rangka menjalankan tugas serta fungsinya untuk mengentas kemiskinan, permasalahan pendataan yang tidak akurat merupakan salah satu hambatan utama dari Dinas Sosial. Terlebih dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, dinas sosial akan memberikan bantuan berdasarkan data penduduk yang tidak mampu.

⁶² Hasil wawancara dengan Pendamping Desa, Hamdimus, SE pada tanggal 8 Mei 2023

4.3.2 Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan faktor utama yang akan menentukan keberhasilan dari sebuah perencanaan atau kebijakan yang akan dijalankan, tanpa faktor anggaran tentunya segala perencanaan akan terhambat. Bahkan, upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sangat didasarkan kepada anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, anggaran yang digunakan oleh dinas sosial serta lembaga pemerintahan lainnya dalam menjalankan program pengentas kemiskinan berasal dari APBN bahkan hingga ke APBD.

Tentunya dalam menjalankan roda pemerintahan memerlukan banyak anggaran kas negara, baik dari pajak maupun sumber lainnya tidaklah semua diperuntukkan untuk bantuan atau pengentasan program kemiskinan, alokasi anggaran yang tersedia dibagi kedalam banyak hal seperti pembangunan infrastruktur serta suprastruktur. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan sendiri tentunya memiliki anggaran yang terbatas, bahkan dalam memenuhi anggaran untuk merealisasikan programnya juga bergantung kepada pemerintahan yang berada di atasnya dan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Kabid Pemberdayaan Sosial Masyarakat Miskin Aceh Selatan, Zulpardi, SH., MM mengatakan :

“... selain perihal pendataan yang belum maksimal, hambatan lainnya yang juga dirasakan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Apalagi mengingat pola pikir mereka yang tetap percaya bahwa dukungan hanya datang dalam bentuk uang atau barang berwujud lainnya, karena sebanyak apapun kita kasih bantuan kalau pola pikirnya masih suka meminta-minta sampai kapan

pun tidak berubah. Hambatan ini, berasal dari pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan dan Dinas Sosial sendiri, serta tidak mungkin ketersediaan anggaran seluruhnya dialokasikan untuk bantuan. Masih banyak hal yang lain yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah, maka salah satu tantangan yang dihadapi dinas sosial di Kabupaten Aceh Selatan adalah keterbatasan anggaran. ...”⁶³

Dari wawancara diatas, kita mengetahui bahwa keterbatasan anggaran juga menjadi kendala yang menghambat dinas sosial untuk mengentas kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu, ada beberapa tambahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang mengharuskan terciptanya anggaran, antara lain pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Kabupaten Aceh Selatan, peneliti menemukan bahwasanya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan jumlahnya terbatas. Serta apabila mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan, alokasi anggaran ini terbagi kedalam beberapa aspek yang dimulai dari Pendidikan, Kesehatan, pembangunan Insfranstruktur, bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu serta hal lainnya yang telah dialokasikan oleh pemerintahan yang semuanya telah dibagi slot atau jumlah anggarannya mengacu kepada kas daerah dan APBD Kabupaten Aceh Selatan.

⁶³

Hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Zulpardi, SH.,MM pada tanggal 2 Mei 2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang harus dihadapi serta diatasi oleh pemerintahan hingga saat ini, terlebih pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Dinas Sosial adalah salah satu lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. Sehingga dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan, Dinas Sosial memiliki peran serta tanggung jawab yang sangat besar untuk mengurangi kemiskinan.

Dari hasil penelitian lapangan mengenai “Peran Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan”, peneliti menyimpulkan:

1. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Aceh telah ditangani serta ditanggulangi oleh pemerintah, Dinas Sosial adalah instansi yang diwenangkan oleh pemerintah untuk menjalankan segala bentuk kebijakan penanggulangan kemiskinan. Adapun peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan adalah :
 - a. Dinas Sosial melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan, bentuk dari pemberdayaan ini adalah seperti melakukan sosialisasi, pelatihan serta penyuluhan.
 - b. Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan, seperti BNPT, PKH dan lainnya.

2. Selanjutnya, dalam melakukan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan Dinas Sosial juga memiliki hambatan. Adapun hambatan tersebut adalah :

- a. Hingga saat ini, pendataan atau sensus ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan masih belum akurat. Ketidak akuratan pendataan ini berdampak kepada kinerja Dinas Sosial di Kabupaten Aceh Selatan, yakni seperti penyaluran program bantuan serta kebijakan lainnya menjadi tidak tepat sasaran.
- b. Selanjutnya, Dinas Sosial juga terhambat karena keterbatasan alokasi anggaran yang dimiliki. Dalam melakukan pengentasan kemiskinan, tentunya dibutuhkan anggaran yang besar.

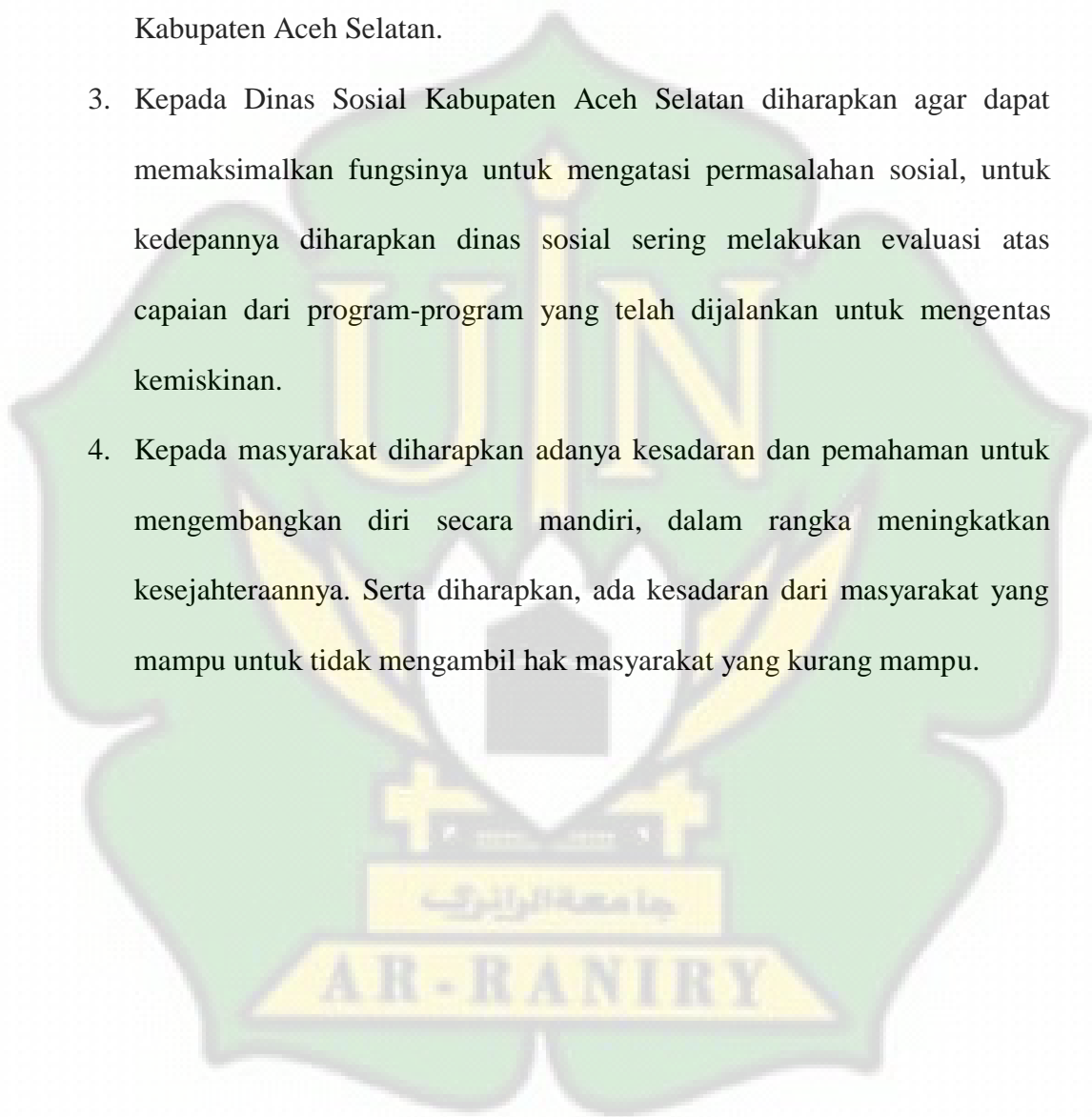
5.2 Saran

Saran dari penelitian ini ditujukan oleh peneliti kepada beberapa pihak terkait, adapun saran dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat menyiapkan program serta kebijakan (qanun) yang secara khusus memberdayakan masyarakat kurang mampu, serta pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan harus melakukan pengawasan serta evaluasi baik dalam pendataan penduduk maupun penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan anggaran untuk membantu masyarakat kurang mampu, menyiapkan

sebuah qanun atau kebijakan khusus melalui fungsi legislasi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, serta menjalankan fungsinya sebagai badan pengawas pemerintahan dalam rangka mengentas kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan.

3. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan diharapkan agar dapat memaksimalkan fungsinya untuk mengatasi permasalahan sosial, untuk kedepannya diharapkan dinas sosial sering melakukan evaluasi atas capaian dari program-program yang telah dijalankan untuk mengentas kemiskinan.
4. Kepada masyarakat diharapkan adanya kesadaran dan pemahaman untuk mengembangkan diri secara mandiri, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Serta diharapkan, ada kesadaran dari masyarakat yang mampu untuk tidak mengambil hak masyarakat yang kurang mampu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Ahmadi, 2009. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta
- Alfian, 2000. Kemiskinan Struktural. Jakarta Pusat: Suatu Bunga Rampal
- Agus Haryadi, 2005. Kemiskinan, Mentalititas Budaya. Yogyakarta : Pustaka Rahima
- Ahmadi, 2009, Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Rineka Cipta
- Arif Muttaqin, 2006. Paradigma dan Pemberantasan Kemiskinan, Rekonstruksi Arah, Pembangunan Menuju Masyarakat yang Berkeadilan, Terbebaskan dan Demokratis. Jakarta:Khanata Pustaka LP3ES Indonesia
- Bimo Walgito, 1995. Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah III. Yogyakarta: Andi Offset
- BAPPENAS, Law Number 25/ 2000 on the National Development Program (Propenas) 2000-2004/ the Republic of Indonesia, Jakarta: BAPPENAS, 2003
- Edy Suhardono,1994. Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fahrudin, A, 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Heru Nugroho, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan, Yogyakarta: Aditya Media, 1995
- Horoeputri, Arimbi, Achmad Sentosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan. Jakarta : Walhi

I. B. Wirawan, 2015 *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta
Prenamedia Group.

Irfan Syaki Beik dan Laily Dwi Arsyanti, 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*.
Jakarta : Rajawali Pers

Janu Murdiyatomoko, 2007. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*.
Bandung: Grafindo Media Pratama

Kamanto Sunarto, 2004. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Kencana Pusaka

Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya

Raho, Bernand, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Sarlito Wirawan Sarwono, 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali
Pers

Jurnal :

Murdiyana dan Mulyana, 2017. Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di
Indonesia, *Jurnal Politik Pemerintahan*

Nano Prawoto, 2009. Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya,
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan

Peraturan :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Masyarakat Miskin

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial

Website :

Trimo Yulianto, Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara> diakses pada tanggal 3 April 2023

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> diakses pada tanggal 3 April 2023

<https://aceh.bps.go.id> diakses pada tanggal 3 April 2023

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd> diakses pada tanggal 6 April 2023

<https://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 6 April 2023

<http://portal.acehselatankab.go.id/itentang-aceh-selatan> diakses pada tanggal 14 Mei 2023

<https://www.investopedia.com/terms/m/marginalism.asp>. Diakses pada 20 Juni 2023.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fisip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 586/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 Februari 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing I

2. Hijrah Saputra, S.Pi.L., M.Sos. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Miftahul Fitri

NIM : 190802077

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Tanggal : 01 Maret 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,

MUJI MULIA

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0906/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/04/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Miftahul Fitri / 190802077**
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Desa Ujung Tanah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 April 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Oktober
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS SOSIAL

Jl. Merdeka No.36. Telp./Fax (0656) 323436 Kode Pos : 23711
Email : dintos.asel@gmail.com, website : www.dintos.acehselatankab.go.id
TAPAKTUAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Junaidi, SP
NIP : 19700617 199101 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

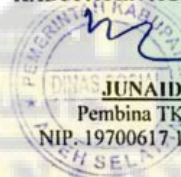
Dengan sesungguhnya menerangkan di bawah ini:

Nama : Miftahul Fitri
Nim : 190802077
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan terhitung mulai tanggal 02-09 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SELATAN



JUNAIDI, SP
Pembina TK. I/ IV b
NIP.-19700617-199101 1 001

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

1. Bagaimana kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Mengapa tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan naik turun?
3. Bagaimana mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?
4. Bidang-bidang mana saja yang bertugas dalam mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan?
5. Kontribusi dan dukungan seperti apa yang dilakukan Dinas Sosial guna mempermudah pengentasan kemiskinan?
6. Apakah kontribusi dan dukungan yang sudah diberikan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?
7. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?
8. Apakah ada kendala atau hambatan yang dialami Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam mengentaskan kemiskinan?
9. Bagaimana upaya Dinas Sosial dalam menanggapi kendala atau hambatan tersebut?
10. Apa harapan Dinas Sosial terkait pengentasan kemiskinan?

B. Pertanyaan untuk Pegawai Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

1. Bagaimana cara Dinas Sosial dalam menggolongkan kriteria masyarakat miskin?

2. Apa yang menjadi standar seseorang layak sebagai penerima bantuan sosial?
3. Bagaimana upaya pengentasan yang teratur dan sistematis?
4. Program apa saja yang sudah dijalankan guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?
5. Bagaimana pembagian bantuan tersebut? Apakah bantuan tersebut dibagikan secara merata kepada masyarakat miskin?
6. Apakah ada masalah yang timbul selama program-program tersebut dijalankan?
7. Apakah program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat?
8. Dengan adanya program-tersebut tersebut apakah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?
9. Bagaimana harapan Dinas Sosial terkait pengentasan kemiskinan?

C. Pertanyaan untuk Pendamping Sosial PKH

1. Bagaimana peran dan kepentingan sebuah lembaga Dinas Sosial dalam mengentas kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apakah ada masalah dan hambatan implementasi program-program salah satunya PKH dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apakah program yang diterapkan sudah sesuai dan tepat sasaran?
4. Apakah program tersebut berdampak baik bagi masyarakat?
5. Apakah dengan adanya program tersebut mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan?

D. Pertanyaan untuk Pendamping Desa

1. Bagaimana menurut saudara tingkat kemiskinan di Aceh Selatan?
2. Apakah upaya pengentasan dari Dinas Sosial sudah terimplementasikan dengan baik di desa ini?
3. Apakah sejauh ini ada masyarakat yang mengeluh terkait program pengentasan kemiskinan dari Dinas Sosial?
4. Apakah peran dari Dinas Sosial begitu urgen dalam hal mengentas kemiskinan?

E. Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apa pendapat saudara mengenai program pengentasan kemiskinan dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apakah ada bantuan yang diberikan untuk saudara?
3. Bantuan seperti apa yang saudara terima?
4. Apakah dengan menerima bantuan tersebut dapat membantu perekonomian saudara?
5. Apa harapan dari saudara untuk kedepannya bagi pemerintah terutama Dinas Sosial dalam mengentas kemiskinan?

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin



Wawancara dengan Pegawai Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin



Wawancara dengan Pendamping Sosial PKH



Wawancara dengan Pendamping Desa



Wawancara dengan Masyarakat



AR-RANIRY